

**ALASAN PENYIDIK TIDAK MENYIMPAN BENDA SITAAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI RUMAH
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA**

(Studi di Polres Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Ditunjukkan Untuk Memenuhi Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

VALENSA TENDAN PUTRI W.K

NIM (115010101111034)



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
 BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penelitian	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana	
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	12
2. Fungsi dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana	14
3. Tujuan Hukum Acara Pidana	14
4. Asas – Asas yang Terdapat dalam Hukum Acara Pidana	15
5. Tahapan Pemeriksaan Perkara dalam Hukum Acara Pidana	24
B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan dan Penyidik	
1. Penyidikan	28
2. Pelaksanaan Tugas Penyidikan oleh Penyidik	37
C. Tinjauan Umum tentang Penyitaan dan Benda Sitaan	
1. Pengertian Penyitaan	38
2. Benda Sitaan.....	39
D. Tinjauan Umum tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).....	43
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Alasan Pemilihan Lokasi	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Memeperoleh Data.....	49
F. Populasi, Sampel, dan Responden	51

G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Definisi Operasional	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Kepolisian Resort Kabupaten Jombang	55
B. Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan berupa Kendaraan Bermotor Roda Dua di Polres Kabupaten Jombang	66
C. Alasan Penyidik Polres Kabupaten Jombang Tidak Menyimpan Benda Sitaan Berupa Kendaraan Bermotor Roda Dua di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Nega Kabupaten Jombang	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	106

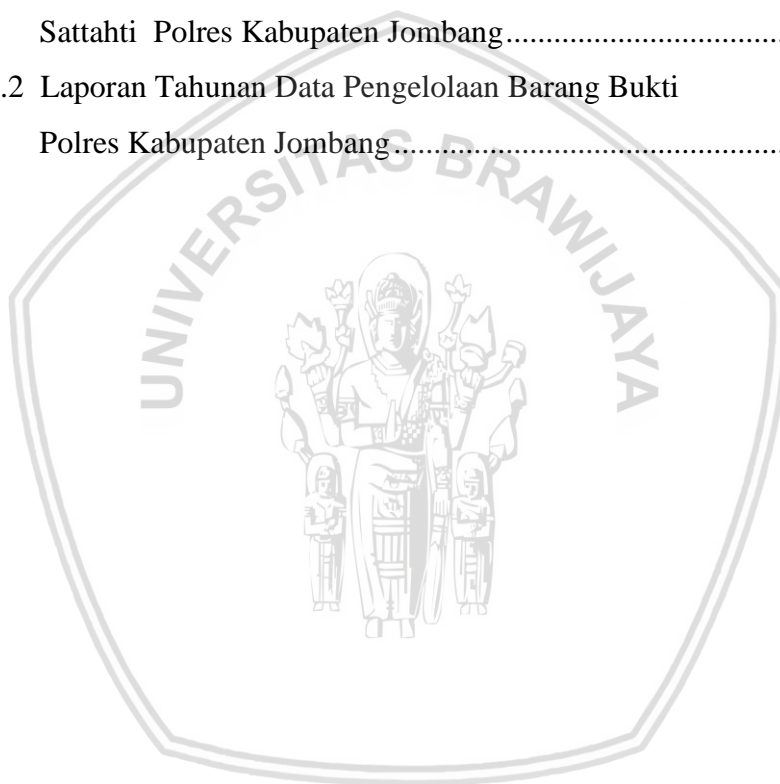
DAFTAR PUSTAKA	108
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	111
----------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) yang Disimpan di Rupbasan Kabupaten Jombang	5
Tabel 1.2	Orisinalitas Hasil Skripsi	6
Tabel 3.1	Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Bermotor yang Disimpan di Sattahti Polres Kabupaten Jombang	51
Tabel 4.1	Rekapitulasi Barang Bukti yang Bernilai Ekonomis Sattahti Polres Kabupaten Jombang	70
Tabel 4.2	Laporan Tahunan Data Pengelolaan Barang Bukti Polres Kabupaten Jombang	87



HALAMAN PENGESAHAN

**ALASAN PENYIDIK TIDAK MENYIMPAN BENDA SITAAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA (Studi di Polres Kabupaten Jombang)**

Oleh:

Valensa Tendan Putri W.K

115010101111034

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal: **21 SEP 2018**

Pembimbing Utama



Dr. Nurini Aprilianda, SH.M.Hum
NIP 19760429002122001

Pembimbing Pendamping



Alfons Zakaria, SH.LLM
NIP 198006292005011002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Yuliati, SH. LL.M.
NIP. 196607101992032003

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Hachmad Safaa'at, SH. M.Si
NIP 196208051988021001

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ALASAN PENYIDIK TIDAK MENYIMPAN BENDA
SITAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
(Studi di Polres Kabupaten Jombang)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Valensa Tendan Putri W.K
- b. NIM : 115010101111034
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui Tanggal : 24 Juli 2017

Pembimbing Utama



Dr. Nurini Aprilianda, SH.M.Hum
NIP 19760429002122001

Pembimbing Pendamping



Alfons Zakaria, SH.LLM
NIP 198006292005011002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Yuliati, SH. LL.M.
NIP. 196607101992032003

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulisan karya ilmiah Skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penulisan karya ilmiah Skripsi ini selain bertujuan sebagai syarat kelulusan namun juga menambah pengalaman serta ilmu bagi Penulis yang tidak didapat selama melaksanakan perkuliahan di kampus. Penelitian skripsi ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Jombang dan berfokus pada pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan serta alasan penyidik tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Terselesaikannya karya ilmiah Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan sumbangsih dari berbagai pihak yang turut memberikan bantuan pemikiran dan masukkan dalam penulisan, serta memberikan bantuan moral kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Secara khusus perkenalkan penulis menyampaikan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Suyono dan Widayati serta adik penulis Illona Nasywa Dwi Wiyana yang selalu *supportive* dan memberikan bantuan moral kepada penulis.
2. Dosen pembimbing skripsi penulis, Ibu Dr. Nurini Aprilianda, SH. M.Hum dan Bapak Alfons Zakaria, SH. LLM. yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian serta juga memberikan sumbangsih pemikiran dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini

3. Seluruh jajaran pegawai Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang, khususnya Bapak Mochamad Toha (Kepala Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang) yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian prasurei skripsi di Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang dan Bapak Suko Wadojo (Pengelola Basan dan Baran Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang) yang telah yang sangat membantu dalam memberikan data yang diperlukan.
4. Seluruh jajaran pegawai Kepolisian Resort Kabupaten Jombang, khususnya Bapak AKBP Agung M, S.I.K., M.H. (Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Jombang) dan Ibu Kompol A. Sumarmi, S.H. (Kabagsumda Kepolisian Resort Kabupaten Jombang) yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitain survei skripsi. Lebih khusus kepada Bapak Iptu Sukandar (Kaurbinopsnal Sat Intelkam Polres Kabupaten Jombang) Bapak IPTU H. A Darussalam, S.H. (Kasattahti Kepolisian Resort Kabupaten Jombang) dan Bapak Aiptu Bambang Yulianto (Baur Barbuk Sattahti Kepolisian Resort Kabupaten Jombang) serta Bapak Iptu Sujadi (Kepala Urusan Pembinaan Operasional), Bapak Aipda Agus Setiyoutomo, SH, dan Briпка Syahrul Arifin (Anggota Satreskrim Polres Kabuapeten Jombang) yang sangat membantu dalam memberikan data yang diperlukan.
5. Sahabat Adelia Renata, Brigita Veni Andriani, Ema Setiorini, Inna Brilliantika, Cynthia Grahadi Puteri, dan Wiwik Dwi Rahayu yang memberikan dukungan moral dan teman – teman penulis baik di Malang, Jombang, maupun kota lainnya menjadi pemicu semangat penulis untuk menyelesaikan penuisan karya ilmiah skripsi ini.

Semoga segala budi baik yang telah diberikan untuk membantu penyelesaian penulisan karya ilmiah skripsi ini mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Pemurah. Amin. Serta harapannya karya ilmiah skripsi ini bermanfaat untuk kawan – kawan Mahasiswa, khususnya FH UB dan juga masyarakat

Malang, 5 September 2018

Penulis

Valensa Tendan Putri W.K



RINGKASAN

Valensa Tendana Putri W.K, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2018, ALASAN PENYIDIK TIDAK MENYIMPAN BENDA SITAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (STUDI DI POLRES KABUPATEN JOMBANG), Dr. Nurini Aprilianda, SH.M.Hum, Alfons Zakaria, SH.LLM.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Alasan Penyidik Tidak Menyimpan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Hal ini dilatarbelakangi atas tindakan penyidik Polres Kabupaten Jombang yang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kabupaten Jombang. Melainkan benda sitaan tersebut disimpan di Sattahti Polres Kabupaten Jombang. Hal ini tentu tidak mematuhi aturan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Jombang? (2) Apa alasan penyidik tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kabupaten Jombang?

Kemudian penulisan karya tulis ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Polres Kabupaten Jombang berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan penyimpanan dimulai dari tahap penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pengamanan. Alasan penyidik Polres Kabupaten Jombang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kabupaten Jombang adalah : (1) Penyimpanan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua bersifat sementara (2) Untuk mempertahankan status keaslian (*quo*) benda sitaan kendaraan bermotor roda dua untuk mempermudah proses penyidikan. (3) Penyidik menganggap proses penyidikan harus efisien baik dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. (4) Tidak adanya aturan yang mewajibkan penyidik menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan. (5) Telah dibentuk Sattahti di Kepolisian Resort Kabupaten Jombang. (6) Masih tersedia tempat untuk menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Sattahti. (7) Penyidik merasa lebih bertanggungjawab secara yuridis terhadap penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/ Milik dengan Penggunaan Kekerasan dan Tanpa Penggunaan Kekerasan Tahun 2011 – 2015.....	2
Gambar 1.2	Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) yang Disita Penyidik Polres Kabupaten Jombang sebagai Barang Bukti Tahun 2017	3
Gambar 1.3	Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) yang Disita Penyidik Polres Kabupaten Jombang sebagai Barang Bukti Tahun 2016.....	4
Gambar 4.1	Peta Jarak Tempuh antara Polres Kabupaten Jombang dengan Rupbasan Kabupaten Jombang.....	60
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Polres Kabupaten Jombang.....	61
Gambar 4.3	Proses Pelaporan Penyimpanan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua.....	85
Gambar 4.4	Alur Pelimpahan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua.....	91
Gambar 4.5	Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Sattahti Polres Kabupaten Jombang.....	106

DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi..... 118
2. Surat Ijin Prasurvey di Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang..... 119
3. Surat Ijin Survei di Polres Kabupaten Jombang 120
4. Surat Keterangan Telah Selesai Suvei di Polres Kabupaten
Jombang 121
5. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi..... 122

B. Kartu Bimbingan Skripsi..... 123

C. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 124

D. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi 125

E. PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pertanyaan Wawancara untuk Pegawai Rupbasan Kelas II Kabupaten
Jombang..... 126
2. Pertanyaan Wawancara untuk Anggota Satintelpol Polres
Kabupaten Jombang 127
3. Pertanyaan Wawancara untuk Anggota Sattahti Polres
Kabupaten Jombang 128
4. Pertanyaan Wawancara untuk Anggota Satreskrim Polres
Kabupaten Jombang 129

BAB I

PENDAHULUAN

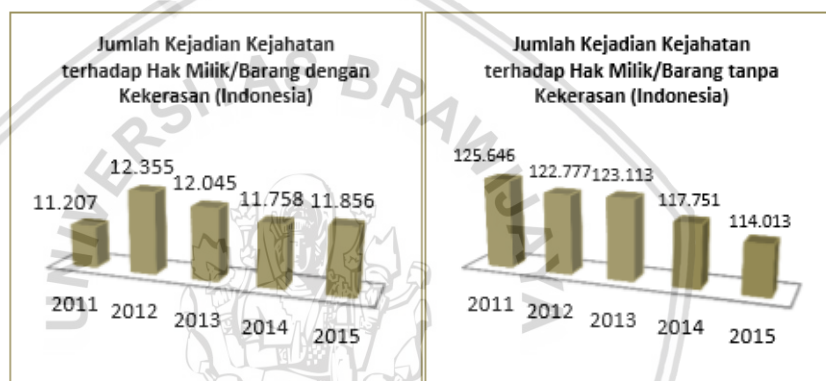
A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini menjadi landasan dasar bahwa negara menjamin hak-hak segala warga negara dan mewajibkan seluruh warga negara mematuhi peraturan hukum tanpa terkecuali. Sehingga setiap warga negara wajib berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, baik peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga tidak terjadi permasalahan di dalam masyarakat. Salah satu peraturan hukum yang dimaksud adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dan untuk pelaksanaan undang – undang ini, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut PP No 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dimana untuk beberapa ketentuannya telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Kejahatan yang terjadi di Indonesia meningkat setiap tahunnya, hal ini berdasarkan dari data statistik kriminal oleh Badan Pusat Statistik dimana telah terjadi 352.936 kasus kriminal di tahun 2015, jumlah ini lebih banyak dari tahun 2014 yang berjumlah 325.317 kasus.

Untuk kasus kejahatan hak milik/benda dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, Badan Pusat Statistik mencatat berdasarkan data Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sudah terjadi 114.013 kasus di tahun 2015, dimana diantaranya merupakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.³

Gambar 1.1
Skema Data Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan dan Tanpa Penggunaan Kekerasan Tahun 2011-2015



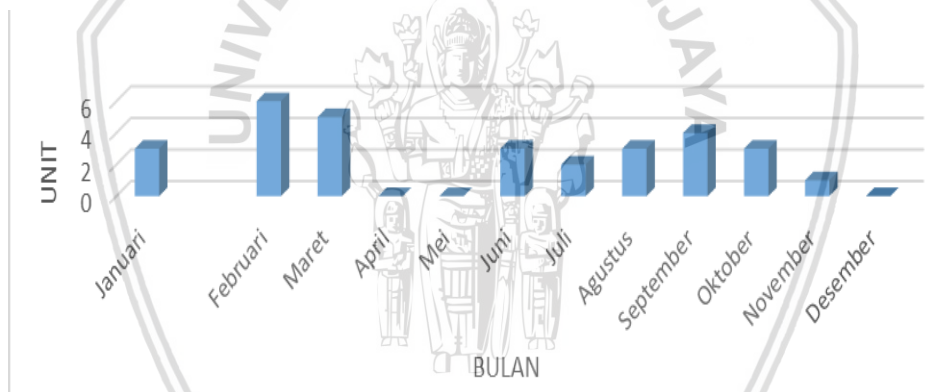
Sumber: Data Sekunder, diolah tahun 2018

Seperti kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Jombang yang telah ditangani dan dilakukan penyidikan oleh Polres Jombang, berdasarkan data Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang selanjutnya disebut Satreskrim Polres Jombang, di tahun 2017 untuk jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Jombang sebanyak 58 kasus dengan kasus yang telah selesai sebanyak 18 kasus (31,09 %). Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2016, dimana terdapat 82 kasus pencurian

³ Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, 2016, **Statistik Kriminal** (online), <https://id.scribd.com/document/339973271/Statistik-Kriminal-2016-pdf>, (25 Maret 2018)

kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Jombang dalam hal ini disingkat Sattahti Polres Jombang, jumlah barang bukti kendaraan bermotor roda dua yang disita oleh Polres Jombang di tahun 2017 sebanyak 28 unit, sedangkan di tahun 2016 sebanyak 51 unit. Barang bukti kendaraan bermotor roda dua tersebut didapatkan dari berbagai macam tindak pidana, namun sebagai besar diperoleh dari tindak pidana pencurian.⁴

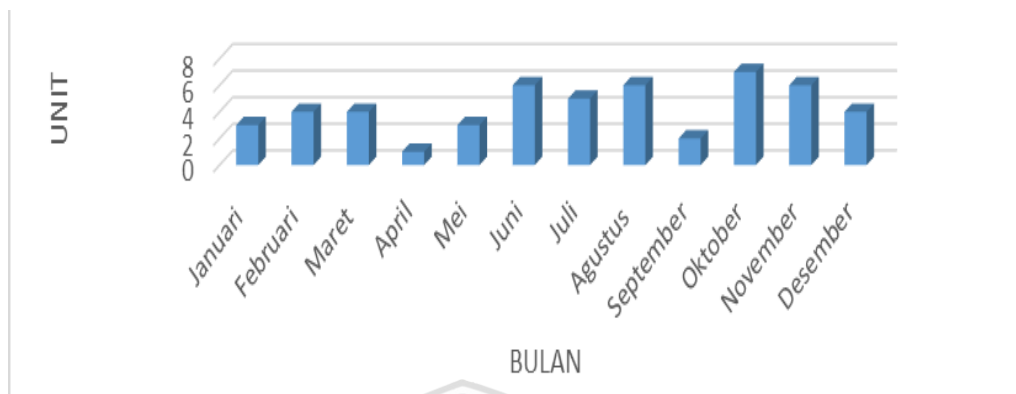
Gambar 1.2
Data Jumlah Kendaraan Roda 2 (Dua) yang Disita Penyidik Polres Jombang sebagai Barang Bukti Tahun 2017



Sumber: Data Sekunder, Diolah Tahun 2018

⁴ Hasil Prasurvey Skripsi di Polres Jombang yang dilakukan peneliti tanggal 20 Februari 2018

Gambar 1.3
Data Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) yang Disita Penyidik Polres
Jombang sebagai Barang Bukti Tahun 2016



Sumber: Data Sekunder, diolah tahun 2018

Penyitaan ini dilakukan Satreskrim Polres Kabupaten Jombang berdasarkan wewenang yang diberikan peraturan perundang–undangan kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik dalam tahap penyidikan. Dalam perkara pencurian tersebut, sepeda motor akan disita sebagai barang bukti oleh penyidik, dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan.

Dalam hal menjamin hak–hak warga negaranya salah satunya jaminan terhadap harta benda yang dimiliki tidak terkecuali harta benda korban yang dijadikan sebagai barang bukti suatu tindak pidana. Dalam hal ini negara bertanggung jawab menjaga, mengelola, dan mengembalikan kembali kepada yang berhak jika benda tadi yang dijadikan barang bukti sudah tidak lagi diperlukan lagi, tidak berhubungan dengan suatu tindak pidana, atau telah diputus oleh hakim dengan berkekuatan hukum tetap. Terkait tanggung jawab ini maka negara membentuk instansi pengelolaan benda sitaan maupun benda rampasan yakni Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau selanjutnya

disebut dengan Rupbasan. Maka dari itu setelah penyidik melakukan penyitaan, maka benda sitaan kendaraan bermotor tersebut disimpan dan dikelola oleh Rupbasan. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 44 ayat 1 KUHAP.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) yang Disimpan di
RUPBASAN Kabupaten Jombang

Tahun	Jumlah	Kondisi	Keterangan
2016	45	Rusak	Titipan dari Polres Lamongan
	98	Rusak	Titipan dari Polres Lamongan
2017	45	Rusak	Titipan dari Plres Lamongan
	98	Rusak	Titipan dari Polres Lamongan

Sumber: Data Sekunder, diolah Tahun 2018

Namun kenyataanya ketentuan Pasal 44 ini tidak dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkan data yang didapatkan tersebut menunjukkan bahwa penyidik Polres Kabupaten Jombang tidak menitipkan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua untuk disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) Kelas II Kabupaten Jombang di tahun 2016 dan 2017. Mengingat terdapat ketentuan dalam Pasal 44 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga PP No 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa penyimpanan benda sitaan dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, maka dari itu tentunya penyidik Polres Jombang harus menyimpan benda sitaanya di Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang . Melihat kenyataan seperti itu, peneliti ingin mengadakan

penelitian dengan judul ALASAN PENYIDIK TIDAK MENYIMPAN BENDA SITAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (Studi di Polres Kabupaten Jombang)

Tabel 1.2
Orisinalitas Hasil Skripsi

Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2017	Fachurizka Maulidatul Chasanah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Penerapan Pasal 44 KUHAP oleh Kejaksaan Melalui Penyimpanan Barang Bukti Berbasis Sistem Teknologi dan Informasi (Studi di Kejaksaan Negeri Surabaya)	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana penerapan Pasal 44 KUHAP dalam penyimpanan barang bukti berbasis informasi oleh Kejaksaan Negeri Surabaya? - Apa hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Surabaya dalam menyimpan barang bukti berbasis sistem informasi? - Bagaimana upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Surabaya dalam menangani hambatan yang sedang dihadapi dalam menyimpan barang bukti berbasis sistem informasi? 	Penelitian ini menunjukkan menitikberatkan pada penerapan Pasal 44 KUHAP dalam penyimpanan barang bukti berbasis sistem informasi oleh Kejaksaan Negeri Surabaya.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Jombang?
2. Apa alasan penyidik Polres Kabupaten Jombang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Jombang
2. Untuk memahami dan menganalisis alasan penyidik Polres Kabupaten Jombang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kabupaten Jombang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pembahasan terkait ilmu hukum acara pidana tentang kewenangan dan proses pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan dan alasan penyidik Polres Kabupaten Jombang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kabupaten Jombang

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menjadi salah satu literatur yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti/insan akademis lainnya, yang mempunyai minat dan perhatian yang sama terutama pada umumnya studi keilmuan Hukum Pidana, serta khususnya pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Jombang dan alasan penyidik Polres Kabupaten Jombang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kabupaten Jombang.

b) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi manfaat pengetahuan, khususnya untuk masyarakat terkait pemilik barang bukti kendaraan bermotor roda dua untuk mengetahui kejelasan status dan kondisi kendaraan bermotor roda dua miliknya yang menjadi barang bukti suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Jombang

c) Bagi Pembentuk Undang-Undang

Diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan agar memperhatikan pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Jombang dan alasan penyidik Polres Jombang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kabupaten Jombang.

d) Bagi Pemerintah

Diharapkan mampu memberikan pemikiran dalam upaya memaksimalkan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang memuat alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukannya yakni jumlah kejahatan di Indonesia yang semakin meningkat khususnya kasus tindak pidana dengan barang bukti kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di Jombang dan fakta bahwa penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tidak dilakukan di Rupbasan, rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Jombang dan alasan penyidik Polres Kabupaten Jombang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kabupaten Jombang serta manfaat penelitian yang mengurai kegunaan dari penelitian yang akan digunakan bagi akademisi, masyarakat, pembentuk undang-undang dan bagi pemerintah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Yakni berisi kajian pustaka mengenai teori-teori atau pendapat – pendapat dari para ahli serta hasil atau informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian tentang tinjauan umum hukum acara pidana, penyidikan dan

penyidik, penyitaan dan benda sitaan, serta tinjauan umum tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisa data dari hasil penelitian. Dimulai dari jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris, metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis, alasan pemilihan Polres Kabupaten Jombang sebagai lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang didapat dari hasil wawancara dan studi pustaka, populasi, sampel, dan responden, dan teknik analisis data deskriptif, serta definisi operasional tentang penyimpanan, benda sitaan, penyidikan, dan rumah penyimpanan benda sitaan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dari penelitian dimana peneliti memaparkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Jombang dan alasan penyidik Polres Kabupaten Jombang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kabupaten Jombang

BAB V PENUTUP

Bab ini tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Jombang dan alasan penyidik Polres

Kabupaten Jombang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kabupaten Jombang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian dan definisi hukum acara pidana itu sendiri, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu antara lain: pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-penuntutan, putusan pengadilan, pengertian upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan pengertian penahanan.

Menurut Sudarto Gautama, Hukum Acara Pidana merupakan aturan yang memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya apabila terdapat persangkaan bahwa hukum pidana telah dilanggar. Fungsi hukum acara pidana adalah menegakkan hukum pidana. Hukum Acara Pidana berjalan sejak adanya persangkaan tindak pidana walaupun tanpa permintaan dari korban kecuali untuk tindak pidana yang ditentukan lain oleh Undang-Undang. R Soesilo, bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal, sebagai berikut :³

³ R. Soesilo, **Hukum acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)**, Politeia, Bogor, 1982, hlm 3.

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran tentang kejahatan apa yang sudah dilakukan.
- b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan , siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik, dan menyidik orang -orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan yang menjelaskan tentang bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh putusan hakim dan cara bagaimana isi putusan hakim itu dilaksanakan.

Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh putusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilaksanakan. Demikian pula J.C.T. Simorangkir, mengemukakan pengertian hukum acara pidana yakni hukum acara yang melaksanakan hukum pidana materiel.⁴

⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 4.

Adapun Van Bemmelen, mengemukakan pengertian dengan menggunakan istilah ilmu hukum acara pidana, yaitu mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran dari undang-undang pidana.⁵

2. Fungsi dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Fungsi pokok Hukum Acara Pidana adalah:

- a. Mencari kebenaran materiil yakni kebenaran yang lengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketetapan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan bertujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melanggar hukum pidana dan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh pengadilan guna menentukan adakah bukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah pelakunya bisa dipersalahkan atau tidak.
- b. Memberikan putusan hakim
- c. Melaksanakan putusan Hakim

Ruang lingkup acara pidana adalah tata cara peradilan termasuk hal-hal yang dikhususkan misalnya peradilan anak, ekonomi, dan lain-lain.

Tujuan hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁶

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP

Tahun 1982, bahwa tujuan dari hukum acara pidana diantaranya adalah:⁷

⁵ Ibid,

⁶ M. Yahya Harahap, **Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13.

⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, op.cit. hlm 8.

- a. Mencari dan memperoleh setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil yakni kebenaran yang lengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan aturan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
 - b. Mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan karen melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya diperiksa dan diputus hakim guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipidana.
 - c. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.
3. Asas – asas dalam Hukum Acara Pidana:
- a. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP merupakan penjabaran Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan salah satu dari hak asasi manusia.⁸

Makna cepat berhubungan dengan waktu, makna sederhana berhubungan dengan prosesnya dan makna biaya ringan berhubungan dengan biaya dalam perkara di pengadilan. Prinsip peradilan cepat tentunya tidak mengorbankan keseriusan dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil.

⁸ Jur Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 13.

Beberapa pasal dalam KUHAP menyebutkan batasan waktu dalam rangkaian proses beracara pidana, antara lain:

- 1) Pasal 19 ayat (1) KUHAP tentang batas waktu penangkapan
- 2) Pasal 25-29 KUHAP tentang batas waktu penahanan
- 3) Pasal 110 ayat (4) jo Pasal 138 KUHAP tentang pelimpahan perkara
- 4) Pasal 233 KUHAP tentang upaya banding
- 5) Pasal 245 KUHAP tentang kasasi.⁹

Selain tercantum waktu secara limitatif dalam KUHAP, terdapat pasal-pasal yang menggunakan isitilah segera, diantaranya:

- 1) Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik (Ketentuan Pasal 106 KUHAP)
- 2) Segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik (Ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP)
- 3) Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (Ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP)
- 4) Segera diadili oleh pengadilan (Ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP).¹⁰

Hal lain yang dikehendaki dalam prinsip ini adalah peradilan sederhana. Makna sederhana tentunya secara sempit dapat diartikan tidak berbelit-belit dan rumit. Beberapa ketentuan dalam KUHAP tentang penggabungan perkara dalam satu dakwaan (*voeging*) tercantum dalam Pasal 141 KUHAP, penggabungan perkara gugatan dan ganti kerugian

⁹ Tolib Effendi, **Dasar – Dasar Hukum Acara Pidana**, Setara Press, Malang, 2014, hlm 28-29.

¹⁰ Ibid., hlm 29

tercantum dalam Pasal 98 KUHAP dan lain sebagainya merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip peradilan sederhana.¹¹

Sebagai satu rangkaian kesatuan dalam prinsip ini adalah peradilan biaya ringan. Biaya perkara dipersidangkan secara resmi disampaikan bersamaan dengan amar putusan dan dibebankan kepada terdakwa apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan. Pada umumnya biaya perkara yang dijatuhkan kepada terdakwa memang ringan dan segala proses peradilan mulai dari penyidikan sampai dengan eksekusi terdakwa tidak dikenakan biaya kecuali berupa sanksi biaya perkara.¹²

b. Praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan terdapat pada penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP.

Mengacu pada ketentuan di dalam KUHAP tersebut, maka untuk dapat menentukan seseorang melakukan tindak pidana ataukah tidak haruslah melalui proses pembuktian untuk menemukan unsur kesalahan dari pelaku dan untuk membuktikan bahwa pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Proses pembuktian dapat dilakukan melalui pengadilan, dan seseorang baru dinyatakan bersalah setelah mendapat putusan pengadilan bersifat tetap.¹³ Selain prinsip *Equality before the Law*, prinsip *Presumption of Innocence* juga

¹¹ Ibid., hlm 29-30

¹² Ibid., hlm 30

¹³ Tolib Effendi, op.cit. hlm 24

merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam DUHAM, sehingga kenyataan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan kewajiban yang tetap dijaga oleh penegak hukum.

Akan tetapi di dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, seorang penyelidik maupun penyidik memiliki prinsip *presumption of guilty* yang menyatakan bahwa apa yang sudah dimulai oleh penyidik maupun penuntut umum adalah untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁴

c. Asas oportunitas

Menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu delik jika menurut pertimbangannya jika hal itu dilakukan akan merugikan kepentingan umum. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa asas oportunitas dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Dalam praktik, dalam hal perkara penyelundupan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi tidak diatur, dipakai dasar hukum asas oportunitas (Pasal 35C Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia) dan dilekatkan syarat-syarat perseponeran, yaitu pembayaran denda damai yang disetujui antara pihak kejaksaan dan tersangka.¹⁵

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid., hlm 19

d. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pemeriksaan pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum ditegaskan melalui pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Dalam pemeriksaan pengadilan dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak – anak, namun tetap putusan hakim harus dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Bahkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 dan KUHAP Pasal 195 tegas menyatakan “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.¹⁶

e. Semua orang harus diperlakukan sama di depan hakim (*Equality before the Law*)

Asas yang telah dianut di berbagai negara yang berdasarkan hukum ini dengan tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf a.¹⁷

f. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap

Ini berarti pengambilan putusan tentang salah atau tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatan dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. Ini tertera dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 31.¹⁸

g. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

¹⁶ Ibid., hlm 20-22

¹⁷ Ibid., hlm 22

¹⁸ Jur Andi Hamzah, op.cit. hlm 14.

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum dimana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan yang dimaksud adalah:

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak tersangka ditangkap atau ditahan
 - 2) Bantuan hukum dapat diberikan di setiap tingkat pemeriksaan.
 - 3) Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa di setiap tingkat pemeriksaan pada setiap waktu
 - 4) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak boleh didengar oleh penyidik atau penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara
 - 5) Salinan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum untuk tinggalkan pembelaan.
 - 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat jenis apapun dari tersangka atau terdakwa.¹⁹
- h. Asas akusator dan insikitor (*Accusatoir dan Inquisitoir*)

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum membuktikan bahwa KUHAP menganut asas akusator. Sebagaimana telah diketahui, asas inkisitor berarti tersangka dianggap sebagai objek pemeriksaan untuk pemeriksaan pendahuluan, ini yang dianut dalam HIR. Asas inkisitor ini sesuai dengan anggapan bahwa pengakuan tersangka adalah alat bukti yang terpenting. Dalam setiap pemeriksaan, berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Bahkan kadang-

¹⁹ Ibid., hlm 23

kadang tidak menutup kemungkinan pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan, guna mendapatkan pengakuan tersangka.²⁰

Di era HIR prinsip yang dipergunakan adalah inkusator dimana dapat dilihat dalam Pasal 164 HIR tentang bukti, dimana disebutkan bahwa salah satu bukti adalah pengakuan. Makna pengakuan adalah adanya pernyataan dari terdakwa untuk mengakui atau tidak mengakui perbuatannya dalam persidangan. Adanya bukti ini menunjukkan bahwa terdakwa sebagai objek dari pemeriksaan, terdakwa tidak bebas dalam memberikan keterangan melainkan terbatas untuk mengakui atau tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah KUHAP diberlakukan, bukti pengakuan sudah ditiadakan dan diganti dengan alat bukti keterangan terdakwa, dalam Pasal 184 KUHAP. Yang dimaksud dari keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak selalu berisi tentang pengakuan melakukan atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan”.²¹

Pasal lainnya mengenai dibelakukannya prinsip akusator dalam KUHAP, yakni:

- 1) Tersangka memiliki hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang telah sangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHAP).

²⁰ Ibid., hlm 24-25

²¹ Tolib Effendi, op.cit. hlm 32.

- 2) Terdakwa memiliki hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang telah didakwakan kepadanya (Ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHAP).
 - 3) Dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan kepada penyidik atau hakim (Ketentuan Pasal 52 KUHAP).
 - 4) Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Ketentuan Pasal 55 KUHAP).
 - 5) Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak selama dia berada dalam masa penahanan (Ketentuan Pasal 58 KUHAP).
 - 6) Penuntut umum, penasihat hukum, serta hakim dilarang memberikan pertanyaan kepada terdakwa atau saksi yang bersifat menjerat. Yang artinya terdakwa maupun saksi tidak memiliki jawaban bebas atas pertanyaan yang diberikan (Ketentuan Pasal 166 KUHAP).²²
- i. Pemeriksaan hakim yang bersifat langsung dan lisan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi. Namun tidak dengan acara perdata, dimana tergugat dapat diwakilkan oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan antara hakim dan tersangka maupun

²² Ibid., hlm 32-33

saksi-saksinya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 154 dan 155 KUHAP.²³ Yang dapat dikecualikan dari asas langsung ini adalah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa dihadiri oleh terdakwa, yaitu putusan verstek atau *in absentia*. Tetapi pengecualian ini berlaku hanya untuk pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Ketentuan Pasal 213 KUHAP).²⁴

Ketentuan terdakwa harus hadir dalam persidangan (prinsip *in presentia*) merupakan kewajiban, dimana berlaku apabila dalam pemeriksaan perkara, terdakwa hanya satu dan bila tidak hadir setelah dua kali pemanggilan secara sah, maka harus dihadirkan secara paksa. Ketentuan ini juga tidak berlaku apabila terdakwa lebih dari satu orang, dan salah satunya telah hadir dalam muka persidangan.²⁵

Pasal 153 ayat (2) KUHAP menyatakan "Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi". Pasal ini ditafsirkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara lisan yang artinya berupa komunikasi langsung antara para pihak yang memeriksa baik hakim dan penuntut umum dengan dihadiri terdakwa.

Prinsip *in presentia* ini dikecualikan menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa

²³ Pasal 154 KUHAP Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini
Pasal 155 KUHAP Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya

²⁴ Jur Andi Hamzah, loc.cit.

²⁵ Tolib Effendi, op.cit. hlm 34.

pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 38 ayat (1), undang-undang tersebut menyatakan “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.²⁶

5. Tahapan Pemeriksaan Perkara dalam Hukum Acara Pidana

1) Penyelidikan

KUHAP memberikan istilah penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”. Jadi penyelidikan ini adalah tindakan untuk mendahului suatu penyidikan.²⁷

2) Penyidikan

Definisi penyidikan yakni dalam Pasal 1 angka 2 yakni serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

²⁶ Ibid., hlm 35

²⁷ Jur Andi Hamzah, *op cit*, hlm 119

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁸

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e) Penahanan sementara;
- f) Penggeledahan;
- g) Pemeriksaan atau interogasi;
- h) Berita acara (Penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
- i) Penyitaan;
- j) Penyampingan perkara;
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan dikembalikannya pada penyidik oleh penuntut umum untuk disempurnakan.²⁹

3) Penuntutan

- a) Prapenuntutan

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara No 3209.

²⁹ Jur Andi Hamzah, op.cit. hlm 120.

Istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk oleh penuntut umum untuk disempurnakan penyidikan oleh penyidik.³⁰

Ketentuan yang mengatur tentang prapenuntutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³¹

b) Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili.

³⁰ Ibid., hlm 158

³¹ Pasal 14 huruf b Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik

Pasal 110

- ayat (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- ayat (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- ayat (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik

Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHP “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”.

Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan atautkah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu, hal ini terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Pasal 140 ayat 2 butir b dan c, isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan. dan selanjutnya bahwa turunan ketetapannya harus disampaikan kepada tersangka ataupun keluarga ataupun penasihat hukum dari tersangka tersebut. Ini biasa disebut dengan Surat Perintah Penghentian Penuntutan.³²

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum tersebut tercantum dalam Pasal 140 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan penjelasan bahwa perkaranya ditutup demi hukum diartikan sesuai dengan Buku I Bab VIII tentang hapusnya hak

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara No 3209.

menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77, dan 78.³³ (*non bis in idem*, terdakwa meninggal, dan lewat waktu)

Hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan bahwa jika kemudian ternyata ada alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkan karena kurang bukti-bukti, maka penuntut umum dapat menuntut tersangka (Pasal 140 ayat (2) butir d).³⁴

B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan dan Penyidik

1. Penyidikan

Pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁵ Sedangkan tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memberikan pembuktian tentang tindak pidana yang telah dilakukannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penyidik akan mengumpulkan keterangan berupa fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.³⁶ Penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan setelah diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid

³⁶ M. Husein harun. **Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana**. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1991 hlm 58.

yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan dimulai setelah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. apa tindak pidana yang telah ia lakukan;
- b. Kapan tindak pidana tersebut dilakukan;
- c. Dimana tindak pidana tersebut dilakukan;
- d. Dengan apa tindak pidana tersebut dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
- f. Mengapa tindak pidana tersebut dilakukan;
- g. Serta siapa pembuatnya.

Proses penyidikan tindak pidana adalah:

- a. Penyelidikan;
- b. Penindakan:
 - 1). Pemanggilan;
 - 2). Penangkapan;
 - 3). Penahanan;
 - 4). Penggeledahan;
 - 5). Penyitaan;
- c. Pemeriksaan:
 - 1). Saksi;
 - 2). Ahli;
 - 3). Tersangka;
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara:
 - 1). Pembuatan resume;
 - 2) Penyusunan berkas perkara;

3) Penyerahan berkas perkara;

Kegiatan Penyidikan:

- a. Penyidikan dilakukan berdasarkan laporan yang diterima penyidik ataupun yang diketahui langsung oleh penyidik.
- b. Penindakan merupakan setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang ataupun barang yang memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti ataupun terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang ataupun barang bukti didalam suatu tindak pidana menjadi jelas dan ditulis dalam berita acara pemeriksaan .
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah kegiatan akhir dari semua proses penyidikan tindak pidana.

Dalam proses penyidikan, upaya yang dilakukan penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan adalah definisi secara etimologi dari Upaya Paksa. Dan menurut Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir mengakui bahwa sesungguhnya upaya paksa hanya bisa dilakukan dalam tahap penyidikan, karena dalam tahap penyelidikan, belum sampai pada penegakan hukum.³⁷

³⁷ M. Husein Harun, op.cit. hal 89.

a) Penangkapan

Pasal 1 angka 20 KUHAP yang dimaksud dengan penangkapan adalah “Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang terdapat dalam undang-undang ini.

Persyaratan penangkapan adalah:³⁸

- 1) Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan/penuntutan/peradilan.
- 2) Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana, baru dapat dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup.
- 3) Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh Kepala Kesatuan/Instansi (Kapolres atau Kapolsek) selaku penyidik.
- 4) Surat perintah penangkapan berisi:
 - a. Pertimbangan dan dasar hukum penangkapan;
 - b. Nama – nama petugas, pangkat, Nrp, jabatan;
 - c. Identitas tersangka yang ditangkap (ditulis secara lengkap/jelas);
 - d. Uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan;
 - e. Tempat atau kantor dimana tersangka akan diperiksa;
 - f. Jangka waktu berlakunya Surat Perintah Penangkapan.

³⁸ H.M.A Kuffal, **Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan**, UMM Press, Malang, 2007, hlm 2-3.

- 5) Setiap kali selesai melaksanakan SPRIN Penangkapan, petugas pelaksana membuat Berita Acara Penangkapan.
- 6) Selain untuk kepentingan penyidikan, penyidik/penyidik pembantu berwenang melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka/terdakwa atas permintaan Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, dan atau atas permintaan Hakim untuk kepentingan peradilan lain atau Interpol.
- 7) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran, meskipun tidak dapat ditangkap akan tetapi apabila sudah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut – turut tidak mau memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah dapat ditangkap oleh Penyidik.

Batas waktu atau lamanya penangkapan, menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, bahwa “seseorang yang telah dilakukan penangkapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP dapat dilakukan paling lama 1 (satu hari)”.³⁹

b) Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP menentukan bahwa, ”penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, sedangkan dalam Pasal 20 ayat 1 telah dijelaskan untuk kepentingan penyidikan, penyidik ataupun penyidik pembantu melakukan penahanan. Alasan untuk dapat melakukan penahanan

³⁹ Andi Sofyan dan Abd.Asis, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 131-132.

terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu adanya kekhawatiran jika tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana yang telah ia lakukan.⁴⁰

Penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan Pasal 21 ayat 1 KUHAP:

- 1) Tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan;
- 2) Dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup”.

Syarat penahanan berbeda dengan syarat pengkapan. Perbedaan tersebut dalam hal bukti. Pada penangkapan syarat bukti didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sedangkan syarat pada penahanan adalah bukti yang cukup.⁴¹

Bukti yang cukup adalah dimana diatur dalam KUHAP BAB XVI Bagian Keempat Pasal 183-189 yaitu sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.⁴²

⁴⁰ M.Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 167.

⁴¹ Ibid.

⁴² H.M.A Kaufal, op.cit. hlm 24-25.

Lamanya dan perpanjangan penahanan berbeda – beda di setiap tingkat pemeriksaan:

1) Tingkat penyidikan

Menurut Pasal 24 KUHAP, bahwa perintah penahanan pada tingkat penyidikan, dapat dilakukan paling lama dua puluh (20) hari dan dapat diperpanjang empat puluh (40) hari.⁴³

2) Tingkat Penuntutan

Berdasarkan Pasal 25 KUHAP, bahwa untuk perintah penahanan pada tingkat penuntutan, dapat dilakukan paling lama dua puluh (20) hari namun dapat diperpanjang jika dibutuhkan selama tiga puluh (30) hari, namun kepentingan pemeriksaan telah dipenuhi sebelum masa penahanan berakhir, maka tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka. Dan dalam waktu enam puluh (60) hari tersebut penuntut umum harus mengeluarkan tersangka.⁴⁴

c) .Pengeledahan

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 KUHAP yang dimaksud dengan “pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, sedangkan Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pengeledahan badan adalah tindakan

⁴³ Andi Sofyan dan Abd.Asis, op.cit. hlm 138.

⁴⁴ Ibid., hlm 138-139.

tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita”. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan dan/atau penggeledahan pakaian sesuai cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dimana patut dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara layak dan dalam waktu yang singkat.⁴⁵

Penyidik melakukan penggeledahan rumah dan atau pakaian dan atau badan bertujuan untuk kepentingan penyidikan yaitu mencari serta mengumpulkan (menyita) alat pembuktian (alat bukti/barang bukti), yang dengan alat pembuktian tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang telah terjadi dan dapat menemukan (menangkap) tersangkanya.⁴⁶

Tujuan penggeledahan ini juga berbeda dengan tujuan penyitaan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan, sedangkan tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan.⁴⁷

⁴⁵ Ibid., hlm 150.

⁴⁶ H.M.A Kaufal, op.cit. hlm 58.

⁴⁷ Andi Sofyan dan Abd Asis, loc.cit.

Berbeda dengan tindakan penahanan yang memberikan kewenangannya pada semua pejabat/instansi penegak hukum yaitu Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim PN/PT/MA, maka KUHAP hanya mengatur dan memberikan wewenang untuk melakukan tindakan penggeledahan hanya pada pejabat penyidik POLRI/PPNS.⁴⁸

Tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik pada umumnya mempunyai hubungan dengan tindakan penyitaan benda guna kepentingan pembuktian dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan juga peradilan. Dari pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang penggeledahan dapat diketahui bahwa tujuan/sasaran dalam penggeledahan bukan hanya untuk pemeriksaan TKP dan atau melakukan penangkapan terhadap tersangka/teerdakwa, akan tetapi juga mencari dan menemukan benda yang dapat disita untuk kepentingan pembuktian. Sehingga dalam praktik penyidikan, pada waktu penyidik meminta Surat Izin Penggeledahan Kepada Ketua PN setempat pada umumnya secara sekaligus diajukan pula permintaan Surat izin untuk melakukan penyitaan.⁴⁹

d) Penyitaan

Pasal 1 angka 16 “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ M.M.A Kuffal, op.cit. hlm 64-65.

penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan”.⁵⁰

Tujuan penyitaan agar untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyelidikan/penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan di pengadilan. Dalam hal penyitaan, maka pejabat yang berwenang melakukannya adalah penyidik dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 58, 129, dan 130 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

e) Pemeriksaan Surat dan Penyitaan Surat

Yang dimaksud surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bertujuan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan pikiran seseorang dan dapat digunakan sebagai pembuktian. Surat-surat yang dapat diperiksa dan disita adalah surat yang dicurigai telah mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana yang diperiksa.⁵¹

2. Pelaksanaan Tugas Penyidikan oleh Penyidik

Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah:

- a. Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang telah diberi kewenangan khusus oleh undang-undang

Bedasarkan Pasal 2 PP No. 27/1983 tentang pelaksanaan KUHAP, terdapat ketentuan terkait syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara No 3209.

⁵¹ M.M.A Kuffal, op.cit. hlm 16.

POLRI yaitu minimal pangkat Brigadir Dua Polisi (BRIPDA) wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

C. Tinjauan Umum tentang Penyitaan dan Benda Sitaan

1. Pengertian Penyitaan

Definisi penyitaan terdapat dalam Pasal 1 butir 16 yakni serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁵²

Adapun prosedur atau tata cara penyitaan suatu benda atau alat, sebagai berikut:⁵³

- a. Menurut Pasal 40 KUHAP, bila tertangkap tangan, penyidik menyita benda dan alat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau benda lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana
- b. Menurut Pasal 41 KUHAP, bila tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita surat atau paket atau benda yang pengirimannya melalui kantor pos, telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi sepanjang surat atau paket tersebut diperuntukkan untuk tersangka atau yang berasal dari tersangka, maka dari itu tersangka atau pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi wajib memberikan surat tanda penerimaan.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara No 3209.

⁵³ Ibid

- c. Menurut Pasal 42 KUHAP, penyidik berwenang memerintahkan kepada seseorang yang menguasai suatu benda yang berhubungan dengan suatu tindak pidana untuk menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk orang yang menyerahkannya, penyidik memberikan surat tanda penerimaan.
- d. Menurut Pasal 43 KUHAP, penyitaan surat atau tulisan lainnya sepanjang bukan rahasia negara, penyidik menyita sepanjang dilakukan setelah mendapat persetujuan mereka dan atas izin dari ketua pengadilan negara setempat kecuali peraturan perundang-undang menyatakan lain.

2. Benda Sitaan

Pasal 39 ayat (1) angka a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menguraikan definisi dari benda yang dapat disita adalah “benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”. Benda-benda lain selain yang diduga diperoleh atau sebagai hasil dari tindak pidana, adalah:⁵⁴

- a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya.
- b. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidik delik.
- c. Benda yang khusus yang dibuat atau diperuntukkan melakukan delik.
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan suatu tindak pidana yang dilakukan.

⁵⁴ Ibid.

Untuk tindak pidana yang tertangkap tangan berlaku aturan khusus tentang penyitaan. Disini dipakai pengertian yang lebih luas artinya, seperti pada Pasal 40 “dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”.⁵⁵

Ketentuan lain yang merupakan pembaharuan dalam KUHAP tentang penyitaan ialah tentang pengaturan yang rapi tentang bagaimana penyimpanan, pemeliharaan, dan penyelesaian akhir benda sitaan tersebut.⁵⁶

Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa “benda sitaan disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”. Dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) mengatakan bahwa “selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda disita”.

Dalam hal penyimpanan yang bertanggungjawab ialah pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun juga. Di samping itu diatur pula tentang pemeliharaan dan penyelesaiannya terkait tentang benda-benda sitaan yang mudah rusak atau berbahaya ataupun biaya penyimpanannya yang terlalu tinggi.

Dalam pasal 45 mengatur ketentuan jika benda sitaan merupakan benda yang lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak dapat disimpan

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Jur Andi Hamzah, op. cit. hlm 151.

dalam waktu yang lama sampai putusan pengadilan yang ikhrah atau jika memerlukan biaya yang tinggi bila disimpan, maka penyidik melakukan tindakan-tindakan sesuai persetujuan tersangka atau kuasanya yakni melelang atau diamankan dengan disaksikan oleh tersangka dan/atau kuasanya. Bila dilelang, maka hasil pelelangannya berupa uang dipakai sebagai barang bukti tindak pidana tersebut. Namun guna untuk kepentingan pembuktian, diusahakan disisihkan sebagian benda yang dilelang atau diamankan tersebut. Dan bagi benda sitaan yang bersifat terlarang untuk diedarkan, dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Penyelesaian masalah benda sitaan dalam proses penyidikan diatur dalam Pasal 46 Pasal 1 KUHAP, maka atas benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada siapa benda itu dulu disita, atau kepada yang berhak terhadap benda tersebut, apabila:

- a) Kepentingan penyidikan tidak memerlukannya lagi
- b) Perkara tidak jadi dituntut karena perkara tidak cukup bukti atau perkara tersebut bukan suatu tindak pidana.
- c) Perkara yang ditangani penyidik tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum ataupun perkara tersebut telah ditutup demi hukum, kecuali apabila benda tersebut diperoleh atau berhubungan dengan suatu tindak pidana

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP dapat diketahui bahwa benda sitaan/barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah. Namun dalam perumusan Pasal 1 butir 16 KUHAP dapat diketahui bahwa barang bukti memiliki nilai atau fungsi dan memiliki manfaat dalam upaya

pembuktian, walaupun benda sitaan tersebut secara yuridis formal bukan berstatus sebagai alat bukti yang sah, bahkan merupakan benda mati yang tidak dapat berbicara. Akan tetapi dalam praktik penegakan hukum, peradilan barang bukti tersebut ternyata dapat dikembangkan dan dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli (*visum et repertum*) dan keterangan terdakwa. Misalnya sebuah benda berupa senjata api atau senjata tajam setelah disita menjadi barang bukti kemudian ditunjukkan dan ditanyakan kepada saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut oleh tersangka/terdakwa telah digunakan untuk melakukan pembunuhan/penganiayaan. Kemudian keterangan saksi tersebut diperkuat dengan tersangka/terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut. Demikian pula mayat korban pembunuhan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Kedokteran Forensik kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan ke dalam VER (*visum et repertum*) yang isinya sesuai atau dapat memperkuat keterangan saksi dan keterangan tersangka/terdakwa, maka benda sitaan/benda mati yang berubah bentuk menjadi VER tersebut dengan sendirinya mempunyai nilai dan kekuatan sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan ahli.⁵⁷

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa benda sitaan/barang bukti meskipun bukan alat bukti yang sah, tetapi dalam praktik penegakan hukum ternyata dapat dikembangkan dan mempunyai manfaat/kegunaan/fungsi dalam upaya pembuktian atau setidaknya

⁵⁷ H.M.A Kuffal, op.cit. hlm 69-70.

dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat “keyakinan” hakim.⁵⁸

Disamping itu dengan diajukan barang bukti di depan persidangan, maka hakim melalui putusannya dapat sekaligus menetapkan status hukum dari barang bukti dari suatu tindak pidana yang sedang diperiksa dan sudah diputus, yaitu dapat ditetapkan untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya kembali ataukah dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dan dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.⁵⁹

D. Tinjauan Umum tentang RUPBASAN

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa “Benda Sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.

Dalam Pasal 1 Angka 3 PP No 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menyatakan bahwa ”Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan”.

Dasar hukum yang mengatur tentang keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan di ranah hukum Sistem Peradilan Pidana adalah:⁶⁰

a. Pasal 44 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Ayat (1) Benda sitaan disimpan di Rupbasan.

Ayat (2) Penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan baik dan tanggung jawab ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan

⁵⁸ Ibid., hlm 70

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ H.M.A Kuffal, op.cit., hlm 79

benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

b. Peraturan Pemerintah PP No 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yakni:

Pasal 27 Di dalam Rupbasan ditempatkan benda untuk keperluan pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan Hakim.

Pasal 28 ayat (1) benda sitaan yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus melampirkan surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

ayat (2) barang rampasan yang dikeluarkan untuk melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dilakukan sesuai permintaan jaksa secara tertulis.

ayat (3) Barang rampasan yang dimusnahkan dilakukan oleh jaksa dengan disaksikan oleh Kepala Rupbasan

g. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, yakni Pasal 270 ayat (2) “Benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan”.

Tugas Pokok Rupbasan adalah:

- a. Melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara
- b. Melakukan pengelolaan berarti melakukan perbuatan menyimpan dan atau diletakkan di tempat aman agar tidak lekas rusak, hilang, atau berkurang benda dan atau barang yang dimaksud

- c. Dikelola berarti dapat dijamin keselamatan, keutuhan, dan mutu benda atau barang yang dimaksud sehingga tetap terjamin, terpelihara, dan terawat dengan baik.⁶¹

Sedangkan Fungsi Rupbasan adalah:

- a. Melakukan tindakan administrasi terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara
- b. Melakukan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara
- c. Melakukan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara
- d. Melakukan surat menyurat dan kearsipan.⁶²

Menurut Pasal 26, di tiap Ibukota Kabupaten/Kota dibentuk Rupbasan oleh Meneteri Kehakiman. Dan apabila dipandang perlu Menteri Kehakiman dapat membentuk Rupbasan di luar ibukota Kabupaten/Kota.⁶³ Rupbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman. Tanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut terdapat pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan suatu tindak pidana tersebut (penyidikan, penuntutan, dan peradilan) dan tanggungjawab secara fisik terhadap benda sitaan tersebut ada pada kepala Rupbasan.

⁶¹ Tolib Effendi, op.cit. hlm 56.

⁶² Ibid., hlm 57.

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan suatu obyek secara sistematis.³ Dalam penelitian yuridis empiris ini, penulis akan menganalisis terkait bagaimana penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Jombang. Dan kemudian melakukan analisis terkait alasan penyidik Polres Kabupaten Jombang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut di Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang. Dimana sebelumnya telah penulis ketahui bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa penyimpanan benda sitaan dilakukan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁴

Dan menurut Prof Dr Ediwarman, jika peneliti menggunakan pendekatan metode empiris (yuridis sosiologis) dalam penelitiannya, maka peneliti

³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 43

⁴ Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 19.

memulai dari berlakunya hukum positif dan pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat serta pengaruh faktor non hukum terhadap terbentuknya serta berlakunya ketentuan hukum positif.⁵

Berdasarkan pendekatan yuridis sosiologis tersebut, maka penulis melakukan penelitian, memahami, dan menganalisis tentang pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Jombang dan alasan penyidik Polres Kabupaten Jombang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang.

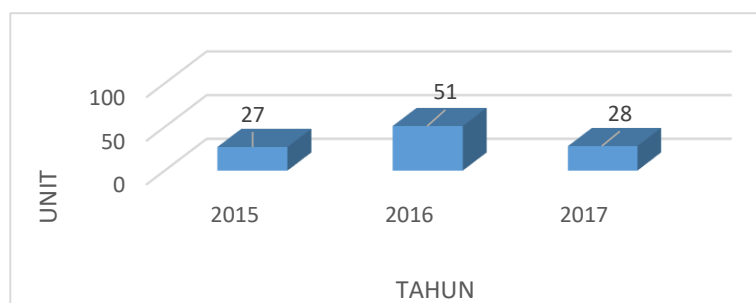
C. Alasan Pemilihan Lokasi

Polres Kabupaten Jombang dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan berdasarkan data dari Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang yang menunjukkan bahwa Polres Kabupaten Jombang tidak pernah menitipkan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua terutama tahun 2016 dan 2017 serta memasuki tahun 2018.⁶ Pernyataan ini juga diperkuat dengan data yang diperoleh dari Polres Kabupaten Jombang, bahwa untuk penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua dilakukan di Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres Kabupaten Jombang.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Disimpan di Sattahti
Polres Kabupaten Jombang

⁵ Ediwarman, **Monograf: Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm 71

⁶ Hasil wawancara prasurvey dengan Bapak Suko Wadojo (Pengelola Basan dan Baran Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang), pada tanggal 23 Januari 2018, diolah.



Sumber : Data Sekunder, yang diolah tahun 2018

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷ Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara. Selain data yang diperoleh dari wawancara, laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang dijadikan peneliti sebagai data primer antara lain:

- a. Buku Register Kejahatan/Pelanggaran Polres Kabupaten Jombang tahun 2016-2017
- b. Buku Register Barang Bukti (Serse B13) Polres Kabupaten Jombang tahun 2016-2017
- c. Data Rekapitulasi Barang Bukti Sattahti Polres Jombang Bulan Januari-Desember 2016

⁷ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 106.

- d. Data Rekapitulasi Barang Bukti Sattahti Polres Jombang Bulan Januari-Desember 2017
- e. Data Rekapitulasi Benda Sitaan yang disimpan Rupbasan Kabupaten Jombang tahun 2016 dan tahun 2017

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁸

E. Teknik Memperoleh Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁹ Di dalam wawancara dapat dipergunakan suatu pedoman wawancara yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara, atau mungkin pula dipergunakan suatu daftar pertanyaan yang berstruktur (*questionnaire*).¹⁰ Pedoman wawancara adalah alat pengumpul data wawancara dalam penelitian yang kualitatif, sedangkan *questionnaire* untuk penelitian yang berbentuk survei.¹¹ Daftar pertanyaan dalam wawancara dapat bersifat terbuka, tertutup, atau keduanya.¹² Teknik pelaksanaan wawancara menurut

⁸ Ibid., hlm 107

⁹ Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Bandung, 2003, hlm 234.

¹⁰ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2010, hlm 25.

¹¹ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, 2010, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 98.

¹² Soerjono Soekanto, op.cit. hlm 26.

Burhan Ashshofa, terdiri dari dua penggolongan besar yakni wawancara berencana (berpatokan) dan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan).¹³

Dalam hal penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan berisikan daftar pertanyaan terbuka. Daftar pertanyaan terbuka ini digunakan karena pengetahuan peneliti tentang responden adalah minimal sekali, maka dari itu dengan mempergunakan daftar pertanyaan terbuka dapat diperoleh jawaban yang lebih luas dan lebih mendalam.¹⁴ teknik pelaksanaan wawancara yang dilakukan peneliti adalah teknik wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), dimana pedoman wawancara hanya memuat pokok-pokok yang ditanyakan, pedoman wawancara ini digunakan agar menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pokok-pokok pertanyaan kepada 1 orang pegawai Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang yang mengurus bidang administrasi penyimpanan benda sitaan dan benda rampasan, 1 orang anggota Sattintelkam Polres Kabupaten Jombang yang mengurus urusan pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres, 2 orang anggota Sattahti Polres Kabupaten Jombang yang menangani tentang administrasi dan buku register barang bukti, dan 3 orang anggota Satreskrim Polres Kabupaten Jombang

¹³ Ibid., hlm 96.

¹⁴ Ibid., hlm 26

Dalam pencatatan hasil wawancara, peneliti melakukan dengan cara pencatatan langsung, artinya pencatatan dilakukan dihadapan responden.¹⁵

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.¹⁶ Studi dokumen atau bahan pustaka ini dilakukan peneliti di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

F. Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.¹⁷ Dalam penelitian ini populasinya adalah keseluruhan pegawai Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang dan keseluruhan anggota Kepolisian Resort Kabupaten Jombang

Sampel adalah keseluruhan sebagian individu yang diselidiki atau diteliti untuk dijadikan sumber pengambilan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti.¹⁸ Dalam penelitian ini, sampel peneliti adalah Pegawai Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang, Anggota Satintelkam Polres Kabupaten Jombang, Anggota Sattahti Polres Kabupaten Jombang, dan Anggota Satreskrim Polres Kabupaten Jombang

¹⁵ Burhan Ashshofa, op.cit. hlm 100

¹⁶ Soerjono Soekanto, op.cit. hlm 21.

¹⁷ Ediwarman, op.cit. hlm 72.

¹⁸ Marzuki, **Metodologi Riset**, BPFE, Jogjakarta, 2002, hlm 22

Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta di lapangan.¹⁹ Responden dalam penelitian ini adalah 1 orang pegawai Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang, yaitu Bapak Suko Wadojo (Pengelola Basan dan Baran Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang) yang berwenang dalam urusan pengadministrasian benda sitaan dan benda rampasan yang dititipkan di Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang. 1 orang anggota Satintelakam Polres Kabupaten Jombang, yaitu Bapak Iptu Sukandar (Kaurbinopsnal Sat Intelkam Polres Kabupaten Jombang) yang berwenang dalam urusan pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres. Dan 2 orang Anggota Sattahti Polres Kabupaten Jombang, yaitu Bapak IPTU H. A Darussalam,S.H selaku Kasattahti Polres Kabupaten Jombang dan Bapak Aiptu Bambang Yulianto selalu Baur Barbuk Sattahti Polres Kabupaten Jombang. Bapak IPTU H. A Darussalam,S.H dan Bapak Aiptu Bambang Yulianto mempunyai tanggung jawab dan wewenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda sitaan di Sattahti Polres Kabupaten Jombang. Serta 3 orang Anggota Satreskrim Polres Kabupaten Jombang yaitu Bapak Iptu Sujadi, Bapak Aipda Agus Setiyoutomo,SH, dan Briпка Syahrul Arifin, dimana Bapak Iptu Sujadi merupakan Kepala Urusan Pembinaan Operasional yang bertanggungjawab dalam hal penyitaan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Kabupaten Jombang. Sedangkan Bapak Aipda Agus Setiyoutomo,SH, dan Briпка Syahrul

¹⁹ Ibid.

Arifin merupakan penyidik Satreskrim yang berwenang melakukan penyitaan dari berbagai kasus yang ditangani Polres Kabupaten Jombang.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara diskriptif. Analisis data yang digunakan terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁰

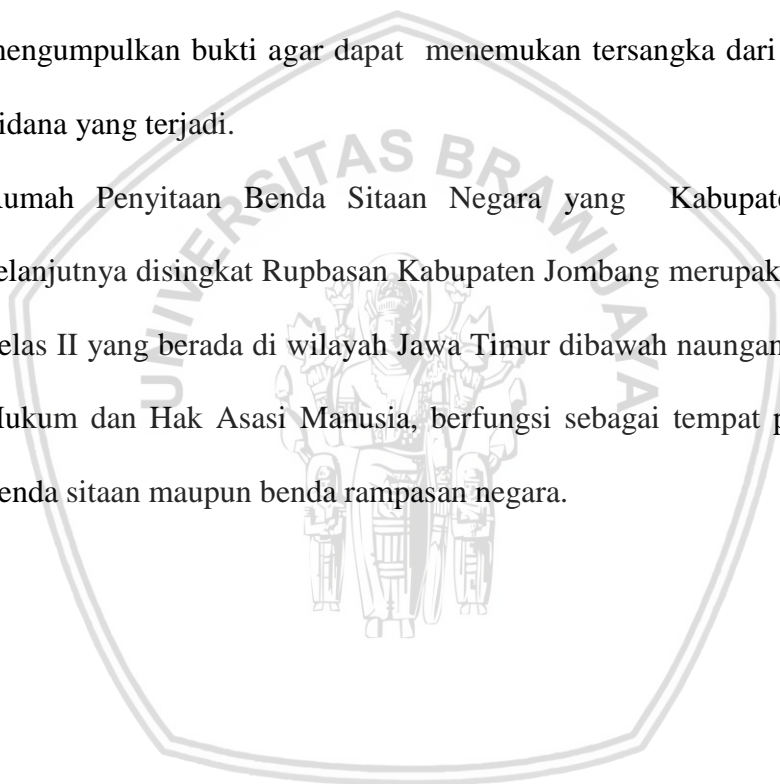
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis hasil-hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder tentang pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Jombang dan alasan penyidik Polres Kabupaten Jombang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang. Kemudian menganalisis berlakunya Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam proses penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Polres Kabupaten Jombang.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional yang di gunakan oleh peneiti merupakan batasan kata kunci dari penelitian ini, berdasarkan kepada objek dan tema yang diangkat dalam penelitian ini:

²⁰ Burhan Ashshofa, op.cit. hlm 107

1. Penyimpanan adalah kegiatan mengelola benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang dilaksanakan oleh Polres Kabupaten Jombang yang bertujuan untuk menjamin keberadaan dan kualitas barang bukti.
2. Benda Sitaan merupakan benda yang dikenakan penyitaan oleh petugas yang berwenang dari setiap tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan, maupun peradilan
3. Penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat menemukan tersangka dari suatu tindak pidana yang terjadi.
4. Rumah Penyitaan Benda Sitaan Negara yang Kabupaten Jombang selanjutnya disingkat Rupbasan Kabupaten Jombang merupakan Rupbasan kelas II yang berada di wilayah Jawa Timur dibawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda sitaan maupun benda rampasan negara.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Kepolisian Resort Kabupaten Jombang

Lembaga Kepolisian Resort Kabupaten Jombang atau disingkat Polres Kabupaten Jombang sendiri merupakan pelaksana tugas dan wewenang dari Polri yang berada di wilayah Kabupaten Jombang yang berada di bawah Kapolda Jawa Timur. Didirikan tahun 1949 dengan luas bangunan 589 m², tanah peninggalan Eks pemerintahan belanda dari tahun 1949 hingga saat ini tahun 2018. Dari awal pembentukannya, Polres Jombang yang dipimpin oleh Kapolres yang telah banyak mengalami pergantian jabatan dimana saat ini dipimpin oleh AKBP Fadli Widiyanto, S.I.K., S.H., M.H.³

Polres Jombang berlokasi di Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor 62 Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur. Telah mengalami banyak pembangunan dari awal masa berdirinya sampai tahun 2017, yakni:

- a. Pada tahun 1949 dibangun gedung Mako Polres Jombang dengan luas bangunan 589 M²
- b. Pada tahun 1950 dibangun rumah dinas Waka Polres Jombang dengan luas 256 M²

³ Sejarah Polres Jombang dalam Buku Profil Polres Jombang tahun 2017 dan Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Sukandar (Kaurbinopsnal Sat Intelkam Polres Kabupaten Jombang) tanggal 16 Mei 2018

- c. Pada tahun 1954 dibangun rumah dinas Kapolres Jombang dengan luas bangunan 268 M² dan ruang Sat Ipp serta Ruang Sat Serse seluas 365 M².
- d. Pada tahun 1965 di bangun gedung TK Bhayangkari Polres Jombang dengan luas bangunan 239 M².
- e. Pada tahun 1972 dibangun gedung pertemuan Polres Jombang dengan luas bangunan 210 M²
- f. Pada tahun 1973 dibangun mess Perwira Polres Jombang dengan luas bangunan 248 M²
- g. Pada tahun 1977 dibangun mushola Polres Jombang dengan luas Bangunan 35 M²
- h. Pada tahun 1984 dibangun kantor Intrograsi Serse dengan luas bangunan 36 M²
- i. Pada tahun 1985 dibangun Gedung Bhayangkari Polres Jombang dengan luas bangunan 58 M²
- j. Pada tahun 1988 dibangun gedung sanggar Tari TK. Bhayangkari Polres Jombang dan Joglo Mapolres Jombang seluas 12 M²
- k. Pada tahun 1991 dibangun gedung Sat IPP Polres Jombang Seluas bangunan 84 M²
- l. Pada tahun 1992 dibangun Kantor penjagaan polres Jombang dengan luas bangunan Kantor penjagaan Polres Jombang dengan luas bangunan 20 M²
- m. Tahun 2015 Renovasi gedung Rupatama Polres Jombang

- n. Pada tahun 2017 Renovasi gedung Graha Bakti Bhayangkara, dan Lobby Polres.⁴

Lokasi polres Kabupaten Jombang berada di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 62 Kabupaten Jombang. Berada di pusat pemerintahan Kabupaten Jombang, membuat Polres Kabupaten Jombang bisa dijangkau dari arah manapun. Lokasi Polres Kabupaten Jombang berjarak 14,7 km dari lokasi Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang.⁵

Gambar 4.1
Peta jarak tempuh antara Polres Kabupaten Jombang dengan
Rupbasan Kabupaten Jombang



Sumber: Data Sekunder, data diolah Tahun 2018

Tugas Lembaga Kepolisian Resort Kabupaten Jombang adalah:

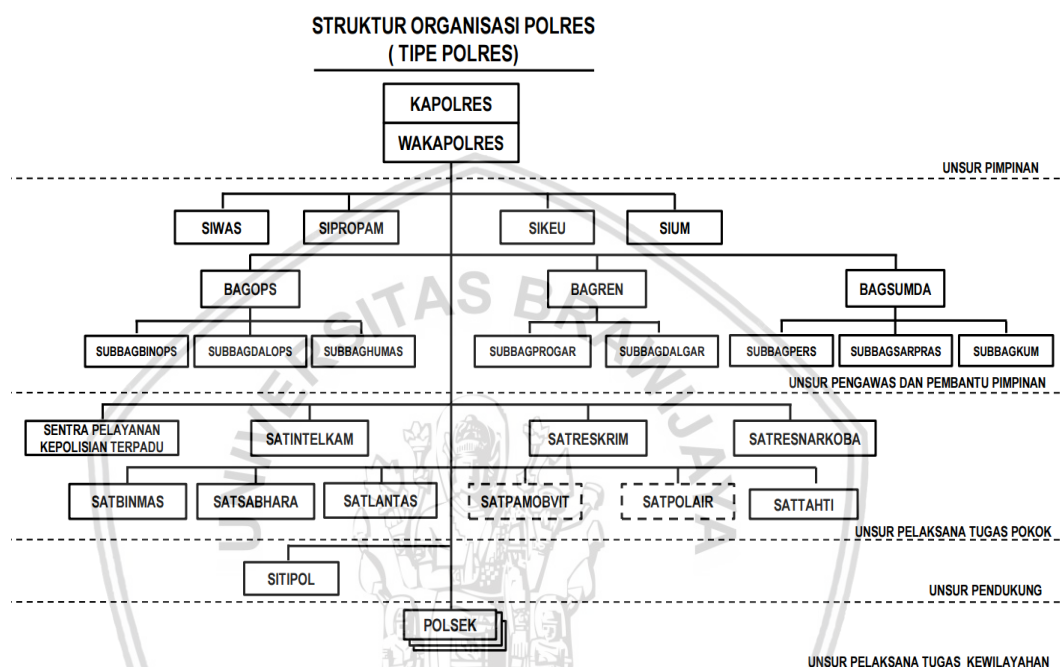
- a. Memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat Kabupaten Jombang;
- b. Menegakkan hukum yang berlaku; dan

⁴ Ibid

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Sukandar (Kaurbinopsnal Sat Intelkam Polres Kabupaten Jombang) tanggal 16 Mei 2018

- c. memberikan kepada masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Jombang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.⁶

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polres Kabupaten Jombang



Sumber: Data Sekunder, diolah tahun 2018

Unsur Pimpinan dalam Struktur Organisasi Polres:

a. Kapolres

Merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda., bertugas:

- Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya;

dan

⁶ Ibid.

- Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Wakapolres

Merupakan salah satu unsur pimpinan yang berada di bawah Kapolres dan juga bertanggung jawab kepada Kapolres, bertugas untuk:

- Membantu Kapolres melaksanakan tugas dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi yang berada di Polres;
- Memimpin Polres bila Kapolres berhalangan; dan
- Memberikan saran dan pertimbangannya kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tugas pokok Polres.

Unsur Pengawas dan Pembantu pimpinan dalam Struktur Organisasi Polres

- a. Bagian Operasi yang selanjutnya disingkat Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu di bidang operasional pada tingkat Polres dan berada di bawah Kapolres. Dipimpin oleh Kabagops, Bagops ini bertugas untuk merencanakan dan mengendalikan soal administrasi operasi yang dilakukan kepolisian, pengamanan kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan berbagai informasi dan dokumentasi terkait kegiatan yang dilakukan Polres serta mengamankan markas Polres.
- b. Bagian Perencanaan disingkat Bagren merupakan unsur pengawas dan pembantu di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang berada di bawah pimpinan Kapolres. Dipimpin oleh Kabagren, Bagren mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Kerja (Renja),

mengendalikan semua program dan anggaran, serta menganalisa dan mengevaluasi atas semua pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan Polres.

- c. Bagian Sumber Daya disingkat Bagsumda merupakan unsur pengawas dan pembantu di bidang personil, sarana dan prasarana serta hukum yang ada di tingkat Polres. Dipimpin oleh Kabagsumda, Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi semua personil Polres, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.
- d. Seksi Pengawasan disingkat Siwas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan umum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Dipimpin oleh Kasiwas, Siwas bertugas untuk melaksanakan monitori dan melakukan pengawasan umum secara rutin dan insidentil terhadap semua pelaksanaan kebijakan pimpinan di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua anggota, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan di lingkungan Polres.
- e. Seksi Profesi dan Pengamanan disingkat Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu di bidang provos dan pengamanan internal. Dipimpin oleh Kasipropam, bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin anggota, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota dan menyelenggarakan

sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personil yang melanggar ketentuan kedisiplinan dan/atau kode etik profesi Polri.

- f. Seksi Keuangan disingkat Sikeu merupakan unsur pengawas dan pembantu di bidang keuangan. Dipimpin oleh Kasikeu, bertugas melaksanakan pelayanan keuangan terkait kegiatan pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan Polres.
- g. Seksi Umum disingkat Sium merupakan unsur pengawas dan pembantu di bidang administrasi umum dan pelayanan markas. Dipimpin oleh Kasium, bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

Unsur Pelaksana Tugas Pokok dalam Struktur Organisasi Polres:

- a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu disingkat SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. Dipimpin oleh Ka SPKT, bertugas memberikan pelayanan kepolisian terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan, serta memberikan pelayanan informasi.
- b. Satuan Intelijen Keamanan disingkat Satintelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres. Dipimpin oleh Kasatintelkam, bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, memberikan pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum yang diselenggarakan masyarakat serta penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau politik, serta membuat

rekomendasi terkait permohonan izin memegang senjata api dan menggunakan bahan peledak.

- c. Satuan Reserse Kriminal disingkat Satreskrim mempunyai tugas pokok fungsi reserse kriminal. Dipimpin oleh Kasatreskrim, bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan melakukan pengawasan penyidikan suatu tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik di lapangan serta melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
- d. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya disingkat Satresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Dipimpin oleh Kasatresnarkoba, bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
- e. Satuan Pembinaan Masyarakat disingkat Satbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat, dipimpin Kasatbinmas, bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan di masyarakat, memberdayakan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama antara organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan

ketaatan masyarakat terhadap aturan peraturan perundang-undangan serta agar tetap terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

- f. Satuan Samapta Bhayangkara disingkat Satsabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara. Dipimpin oleh Kasatsabhara, bertugas menyelenggarakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tindak pidana ringan, serta pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas Polres.
- g. Satuan Lalu Lintas disingkat Satlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas. Dipimpin oleh Kasatlantas, bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, menyelenggarakan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudinya, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
- h. Satuan Pengamanan Objek Vital disingkat Satpamobvit merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi pengamanan objek vital, bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek atau instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan dari pihak kepolisian.
- i. Satuan Kepolisian Perairan disingkat Satpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian perairan, melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, menyelenggarakan penegakan

hukum di wilayah perairan, melakukan pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta melakukan fungsi SAR.

- j. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti disingkat Sattahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti. Dipimpin oleh Kasattahti, bertugas melakukan perawatan tahanan yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan tahanan, melaksanakan pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti dan melakukan pengadministrasian, serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan.
- k. Seksi Teknologi Informasi Polri disingkat Sitipol merupakan unsur pendukung di bidang pelayanan teknologi dan informasi Polri. Dipimpin oleh Kasitipol, bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, seperti kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk di dalamnya mengenai informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan dalam Struktur Organisasi Polres

Kepolisian Sektor disingkat Polsek merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan. Dipimpin oleh Kapolsek, bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

⁷ Ibid.

Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut Perkap No 8 tahun 2014 tentang Perubahan Perkap No 10/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri, wewenang pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti pada tahap penyidikan ada pada Satuan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Resort Kabupaten Jombang (Sattahti Polres Jombang). Sattahti Polres Jombang merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat Polres dalam daerah wilayah Kabupaten Jombang yang berada di bawah Kapolres Jombang, dengan tugasnya menyelenggarakan perawatan tahanan yakni memberikan pelayanan kesehatan tahanan, melakukan pembinaan tahanan serta melakukan tindakan menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta pengadministrasian yang terkait barang bukti tersebut di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolres dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolres. Dalam melaksanakan tugasnya, Sattahti dibantu oleh:

1. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan disingkat Urmintu, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengadministrasian dan

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak IPTU H.A Darussalam, S.H (Kasat Tahti Kepolisian Resort Kabupaten Jombang) tanggal 25 April 2018

ketatausahaan umum terkait dengan tahanan dan barang bukti yang disimpan;

2. Unit Perawatan Tahanan disingkat Unitwattah, mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib terkait tentang penahanan, memberikan pelayanan kesehatan, melakukan tindakan perawatan, pembinaan jasmani dan rohani semua tahanan yang berada di Polres, dan melakukan pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
3. Unit Barang Bukti disingkat Unitbarbuk, yang bertugas melaksanakan tindakan pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta pengadministrasiannya.⁹

Sattahti Polres Jombang dalam melaksanakan tugasnya terkait pengelolaan barang bukti beserta administrasinya memiliki Standar Operasional Prosedur yang berfungsi sebagai dasar standarisasi anggota Sattahti dalam menjalankan tugasnya tersebut, Standar Operasional ini dibuat berdasarkan Perkap No 8/2014 tentang Perubahan Perkap No 10/ 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.¹⁰

B. Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Polres Kabupaten Jombang

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid

Tabel 4.1
Rekapitulasi Barang Bukti yang Bernilai Ekonomis
Sattahti Polres Kabupaten Jombang

Tahun	Jenis Barang Bukti	Jumlah	Tahun	Jenis Barang Bukti	Jumlah
2016	Uang	Rp 20.876.000,-	2017	Uang	Rp 28.526.000,-
	Logam Mulia	5,88 gram		Logam Mulia	3,75 gram
	Ranmor R2	51 unit		Ranmor R2	28 unit
	Ranmor R4	10 unit		Ranmor R4	3 unit
	Ranmor >R4	2 unit		Ranmor >R4	-
	Alat Berat	-		Alat Berat	-
	Elektronik	98 hp		Elektronik	120 hp dan 1 laptop
	Bahan Bakar	-		Bahan Bakar	-
	Narkotika	43.789 butir pil LL, 34,865 gram sabu		Narkotika	22.450 butir pil LL, 88,299 gram sabu, 309,7 gram ganja
	Kayu	54.567,5 m3		Kayu	33.895,5 m3
	Tanah	-		Tanah	-
	Banguann	-		Banguann	-
	Ternak	-		Ternak	-

Sumber: Data Sekunder, diolah Tahun 2018

Penyimpanan benda sitaan sudah diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan diatur lebih lanjut pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP , namun faktanya hal ini tidak dilaksanakan di Polres Kabupaten Jombang. Pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Jombang berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan Perkap No 8/2014 tentang Perubahan Perkap No 10/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang

Bukti di Lingkungan Polri. Dimana berdasarkan Perkap tersebut, Pengembangan Fungsi Pengelolaan Barang Bukti pada tingkat Polres adalah Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya disingkat Sattahti. Peraturan ini dijadikan landasan hukum oleh penyidik Polres Kabupaten Jombang bahwa benda sitaan kendaraan bermotor roda dua disimpan di lingkungan Polres Jombang untuk keperluan proses penyidikan.¹¹

Berdasarkan Perkap No 8/2014 tersebut, pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Benda Sitaan oleh Sattahti

Dalam tahap penerimaan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua dari penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), maupun Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kabupaten Jombang, terlebih dahulu Sattahti memeriksa Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik tersebut sebagai bahan dasar penerimaan barang bukti kendaraan bermotor roda. Surat Perintah Penyitaan ini merupakan dasar hukum penyidik Polres Kabupaten Jombang melakukan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga memiliki kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan suatu tindak pidana yang telah terjadi, benda yang dilakukan penyitaan ini diantaranya kendaraan bermotor roda dua.¹² Sedangkan Berita Acara Penyerahan

¹¹ Ibid.

¹² Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin-ta/09/IV/2013/ Reskrim, Arisp Sattahti Polres jombang, diolah.

dibuat oleh penyidik yang menerangkan bahwa penyidik telah menerima penyerahan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang diduga ada kaitannya dengan suatu tindak pidana dari pemilik atau penguasanya.¹³ Dua surat inilah yang menjadi dasar penyidik menitipkan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Sattahti Polres Jombang.¹⁴

Setelah meneliti kedua surat tersebut, anggota Sattahti unit barang bukti (Unit Barbuk) yang dipimpin Kasattahti melakukan pengecekan dan pencocokan jumlah dan jenis benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang diterima, apakah cocok dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti atau tidak, dimana pengecekan dan pencocokan secara fisik ini meliputi nomor polisi, merk dan warna kendaraan bermotor roda dua yang disita tersebut, nomor kendaraan, serta nomor mesinnya.

Apabila semua komponen penilaian tersebut telah cocok dengan data yang ada pada Berita Acara Penyerahan Barang Bukti, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa dan meneliti jenis benda sitaan tersebut baik berdasarkan golongan, sifat, dan wujud, benda sitaan yang diterima agar dapat menentukan dimana tempat penyimpanan yang aman.¹⁵ Dalam peneltian ini, benda sitaan yang dimaksud kendaraan bermotor roda dua, maka dilihat dari sifatnya yang tahan terhadap debu serta perubahan suhu udara, serta ukurannya yang relatif besar maka kendaraan bermotor roda dua ini dan juga berwujud padat maka termasuk Benda Sitaan Terbuka

¹³ Berita Acara Penyerahan Barang, Arsip Sattahti Polres Kabupaten Jombang, diolah.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bambang Yulianto (Baur Barbuk Sattahti Kepolisian Resort Kabupaten Jombang) tanggal 23 April 2018

¹⁵ Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia

(Basan Terbuka). Dan dapat disimpan di gudang penyimpanan barang bukti yang dimiliki oleh Sattahti Polres Kabupaten Jombang, dan tidak memerlukan tempat khusus lain.

Setelah dilakukan pemeriksaan terkait sifat dan wujud benda sitaan yang dimaksud, selanjutnya Anggota Sattahti Unit Barbuk dipimpin oleh Kasattahti melakukan pencatatan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut ke dalam catatan Buku Register Daftar Barang Bukti (B-13), dan ditandatangani oleh penyidik yang menyerahkan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut dan salah satu perwakilan Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti (anggota Sattahti Polres Jombang) yang saat itu menerima benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut. Dalam meregister benda sitaan kendaraan bermotor tersebut Anggota Unit Barbuk Sattahti juga harus memperhatikan label merah yang sudah dikaitkan penyidik di setiap kendaraan bermotor roda dua tersebut. Itu artinya, kendaraan bermotor roda dua yang disita oleh penyidik dan dititipkan di Sattahti Polres Kabupaten Jombang sudah dalam kondisi disegel dan diberi label merah oleh penyidik sehingga memudahkan Anggota Unit Baur Barbuk Sattahti meregister dan menyimpannya di Tempat Penyimpanan Barang Bukti Sattahti Polres Kabupaten Jombang.¹⁶

Dalam tahap penerimaan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua ini, beberapa administrasi yang diperlukan berupa:

- a. Berita Acara Penerimaan Barang Bukti

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bambang Yulianto (Baur Barbuk Sattahti Kepolisian Resort Kabupaten Jombang) tanggal 23 April 2018

Dibuat oleh Anggota Unit Barbuk Sattahti Polres Kabupaten Jombang yang menerangkan bahwa Sattahti Polres Kabupaten Jombang telah menerima titipan benda sitaan yang telah diduga memiliki kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dimaksud salah satunya kendaraan bermotor roda dua dari penyidik Polres Kabupaten Jombang.¹⁷

b) Berita Acara Penitipan Barang Bukti

Dibuat oleh penyidik Polres Kabupaten Jombang yang menerangkan bahwa penyidik Polres Kabupaten Jombang telah menitipkan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang diduga memiliki kaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dimaksud kepada Sattahti Polres Kabupaten Jombang.¹⁸

c) Surat Perintah Penitipan Barang Bukti

Surat perintah penitipan ini dibuat oleh atasan penyidik, yang memerintahkan penyidik yang bersangkutan menitipkan menitipkan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang diduga memiliki kaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dimaksud kepada Sattahti Polres Kabupaten Jombang. untuk surat ini, Sattahti Polres Jombang menyimpan salinannya saja.¹⁹

d) Surat Tanda Penerimaan

Surat Tanda Penerimaan ini dibuat oleh Penyidik Polres Jombang yang menerangkan bahwa penyidik Polres Jombang telah

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

diterima dari pihak yang menguasai kendaraan bermotor roda dua yang disita tersebut karena diduga memiliki kaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dimaksud. Sattahti Polres Jombang menyimpan salinannya saja.²⁰

Pencatatan ke dalam Buku Register Barang Bukti (B-13) selesai dilakukan dan segala administrasi yang diperlukan sudah dibuat dan disimpan, selanjutnya anggota Sattahti Unit Barbuk melakukan pemotretan terhadap benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut sebagai bahan dokumentasi. Hasil dari pemotretan sebagai bahan dokumentasi ini juga dilampirkan di Berita Acara Penerimaan yang dibuat Sattahti Polres Kabupaten Jombang. Kemudian anggota Sattahti Baur barbuk melaporkan segala tindakan yang dilakukan dalam proses penerimaan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua kepada Kasattahti Polres Kabupaten Jombang.²¹

Dalam melaksanakan tindakan – tindakan penerimaan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut, anggota Sattahti unit Barbuk harus menyelesaikannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari.²²

2. Pengamanan terhadap benda sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Setelah benda sitaan kendaraan bermotor telah diterima oleh anggota Sattahti Polres Kabupaten Jombang dari penyidik Polres Kabupaten Jombang, maka beralihlah tanggung jawab pengaman benda

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Pasal 12 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, bahwa Pengembalian Fungsi Pengelolaan Barang Bukti wajib melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lama 2 (dua) hari harus selesai dilakukan.

sitaan terbut. Dimana Pejabat Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti dalam hal ini Kasattahti Polres Kabupaten Jombang yang bertanggungjawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Tanggung jawab tersebut dalam bentuk:²³

- a. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan langsung secara rutin maksimal 2 (dua) minggu sekali terhadap benda sitaan kendaraan bermotor tersebut yang disimpan di tempat penyimpanan benda sitaan Sattahti ataupun ditempat lain, dan pemeriksaan ini dicatat dalam Buku Register Kontrol Barang Bukti, ditandatangani oleh Unit Baur Barbuk Sattahti Polres Kabupaten Jombang dan diketahui oleh Kasattahti Polres Kabupaten Jombang
- Buku Register Kontrol Barang Bukti berisikan komponen-komponen seperti :
 1. Hari/tanggal dilaksanakannya kontrol
 2. Nama petugas pelaksana yang melakukan kontrol
 3. Nomor register penerimaan barang bukti
 4. Jenis barang bukti
 5. Jumlah barang bukti
 6. Kondisi barang bukti
- b. Setelah dicatat dalam Buku Register Kontrol Barang Bukti, untuk selanjutnya benda sitaan kendaraan bermotor yang disimpan tersebut dijaga oleh anggota Sattahti agar tidak terjadi pencurian, kebakaran,

²³ Hasil Wawancara dengan dengan Bapak Aiptu Bambang Yulianto (Baur Barbuk Sattahti Kepolisian Resort Kabupaten Jombang) tanggal 23 April 2018

maupun banjir. Dalam hal pengamanan ini, Kasattahti Polres Kabupaten Jombang mengerahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya dalam bentuk jadwal jaga anggota Sattahti. Dimana setiap anggota Sattahti Polres Kabupaten Jombang yang mendapat giliran jaga tersebut wajib melakukan pengamanan dan pencatatan benda sitaan kendaraan bermotor tersebut ke dalam Buku Kontrol Barang Bukti yang setelahnya dilaporkan dan ditandatangani oleh Kasattahti Polres Kabupaten Jombang

- c. Dalam hal terjadi perubahan kondisi terhadap benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang disimpan di tempat penyimpanan Sattahti tersebut meliputi kerusakan, terjadinya kebakaran, ataupun pencurian, maka anggota Sattahti mencatat dan melaporkannya kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang bersangkutan.
- d. Kasattahti melakukan tindakan hukum anggota Sattahti Polres Kabupaten Jombang bila ada petugas yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

3. Pengeluaran Benda Sitaan

Pengeluaran benda sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua dilakukan oleh Sattahti Polres Kabupaten Jombang dapat dilakukan dengan tiga alasan yakni untuk keperluan penyidikan, dilimpahkannya benda sitaan kendaraan bermotor roda dua ke Kejaksaan Kabupaten Jombang, ataupun dikembalikannya benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak.

a. Pengeluaran benda sitaan untuk kepentingan penyidikan

Dalam hal kepentingan penyidikan, anggota Unit Barbuk Sattahti Polres Kabupaten Jombang mengeluarkan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan telah diketahui oleh atasan penyidik tersebut. Terkait pengeluaran ini, anggota Unit Barbuk Sattahti melakukan tindakan berupa:²⁴

- a) Memeriksa dan meneliti atas surat permintaan pengeluaran benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut yang diajukan oleh penyidik dan harus diketahui oleh atasan penyidik tersebut
- b) Setelah pemeriksaan terhadap surat tersebut, anggota Unit Barbuk Sattahti Polres Kabupaten Jombang membuat Berita Acara Serah Terima dan menyampaikannya ke atasan penyidik yang bersangkutan
- c) Dalam hal pengeluaran ini, anggota Unit Barbuk Sattahti Polres Kabupaten Jombang mencatat lama peminjaman benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang dimaksud ke dalam Buku Mutase atau Register yang tersedia
- d) Setelah benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut selesai dipinjam dan dikembalikan lagi oleh penyidik Polres Kabupaten Jombang ke Sattahti Polres Kabupaten Jombang, sebelumnya anggota Unit Barbuk Sattahti memeriksa dan meneliti kembali benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut apakah terjadi

²⁴ Hasi Wawancara dengan Bapak Aiptu Bambang Yulianto (Baur Barbuk Sattahti Kepolisian Resort Kabupaten Jombang) tanggal 23 April 2018

perubahan kondisi atau tidak. Untuk selanjutnya diterima dan disimpan kembali di tempat penyimpanan benda sitaan Sattahti Polres Kabupaten Jombang.

b. Pengeluaran benda sitaan untuk dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum

- 1) Anggota Unit Baur Barbuk Sattahti Polres Kabupaten Jombang dalam hal melakukan pengeluaran terhadap benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang dimaksud, sebelumnya memeriksa dan meneliti terlebih dahulu surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan telah diketahui oleh atas penyidik yang bersangkutan, dimana surat permintaan ini dilampiri dengan bukti P-21 dari Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini dari Kejaksaan Kabupaten Jombang
- 2) Setelah melakukan pemeriksaan terhadap surat tersebut, selanjutnya anggota Unit Baur Barbuk Sattahti Polres Kabupaten Jombang mengeluarkan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang dimaksud dari tempat penyimpanan, dan bila telah diterima oleh penyidik yang bersangkutan, maka tanggung jawab beralih dari Sattahti ke penyidik yang menerima benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut untuk selanjutnya penyidik melimpahkannya ke Jaksa Penuntut Umum.
- 3) Pengeluaran telah dilakukan, selanjutnya anggota Unit Baur Barbuk Sattahti Polres Kabupaten Jombang mencoret benda sitaan kendaraan bermotor yang sudah dikeluarkan dan dikirim kepada

Jaksa Penuntut Umum tersebut dari Buku Register Barang Bukti (B-

13) dengan diketahui oleh Kasattahti Polres Kabupaten Jombang

- c. Pengeluaran benda sitaan kendaraan bermotor roda dua untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak

Dalam hal pengeluaran benda sitaan kendaraan bermotor roda dua untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak berdasarkan Surat Perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik, dalam hal ini yang dimaksud adalah penyidik Polres Kabupaten Jombang, untuk itu Anggota Unit Baur Barbuk dibawah pimpinan Kasattahti Polres Kabupaten Jombang melakukan tindakan berupa:

- 1) Memeriksa dan meneliti Surat Perintah dan/atau Surat Penetapan Pengembalian Benda Sitaan dari atasan penyidik
- 2) Setelah pemeriksaan terhadap surat-surat tersebut, selanjutnya anggota Unit Baur Barbuk Sattahti dibawah pimpinan Kasattahti Polres Kabupaten Jombang membuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kasattahti Polres Kabupaten Jombang dan tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik yang bersangkutan.
- 3) Setelah dilakukan pengeluaran terhadap benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut, anggota Unit Baur Barbuk Sattahti mencatat dan mencoret benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut dari Buku Register Barang Bukti (B-13)

4. Pelaporan penyimpanan benda sitaan kepada Direktorat Perawatan Tahanan (Dittahti) Polda Jawa Timur

Dalam hal penyimpanan yang telah dilakukan oleh Sattahti Polres Kabupaten Jombang, Kasattahti melakukan pelaporan kepada Direktorat Perawatan Tahanan (Dittahti) Polda Jawa Timur sebagai bentuk tanggung jawab terhadap benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang disimpan di Sattahti Polres Kabupaten Jombang. Direktorat Perawatan Tahanan (Dittahti) Polda Jawa Timur merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda Jawa Timur, yang bertugas melakukan tindakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan berupa penyelenggaraan pelayanan kesehatan tahanan, penyelenggaraan pembinaan tahanan serta melakukan fungsi pengamanan dan penyimpanan barang bukti beserta pengadministrasian atas barang bukti tersebut di lingkungan Polda serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

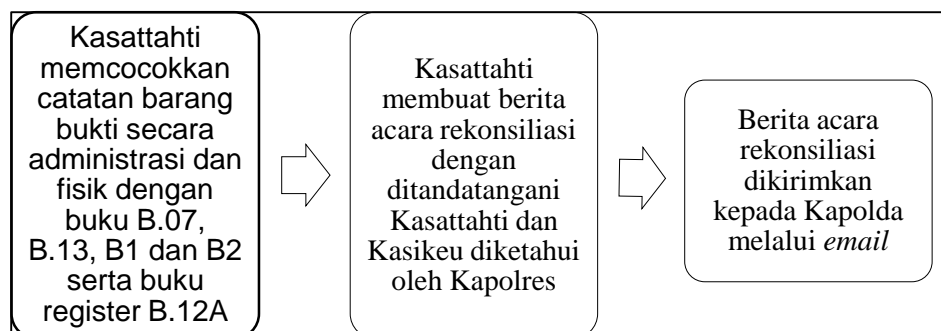
Pelaporan ini dilakukan secara periodik (bulanan, semester. dan tahunan) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti dalam hal ini Kasattahti Polres Kabupaten Jombang dan dibuat oleh Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti dalam hal ini unit Baur Barbuk Sattahti Polres Kabupaten Jombang. dan pelaporan penyimpanan benda sitaan termasuk di dalamnya kendaraan bermotor roda dua diwujudkan dalam bentuk rekapitulasi yang

²⁵ Pasl 212 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 477

dilaksanakan semester dan tahunan. Tindakan pelaporan yang dimaksud yakni:

- a. Kasattahti Polres Kabupaten Jombang menerima laporan secara tertulis benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang diserahkan penyidik Sarterskrim, Satlantas, maupun Satresnarkoba Polres Kabupaten Jombang kepada Sattahti Polres Kabupaten Jombang.
- d. Kasattahti mencocokkan catatan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua secara administrasi dan fisik. Pencocokan secara administrasi ini dengan melihat Buku Register Penyitaan (B-07), Buku Register BB (B-13) dan Buku Polisi B1 dan B2 serta Buku Register B.12A. sedangkan pencocokan secara fisik berupa kesesuaian jenis dan warna benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut, nomor polisi, nomor kendaraan dan nomor mesin.
- e. Setelah melakukan pemeriksaan tersebut, Kasattahti membuat Berita Acara Rekonsiliasi yang telah ditangani Kasattahti Polres Kabupaten Jombang dan Kasikeu yang telah diketahui oleh Kapolres Kabupaten Jombang
- f. Setelah dibuatnya Berita Acara Rekonsiliasi tersebut, Kasattahti Polres Kabupaten Jombang mengirimkannya dengan menggunakan fasilitas Surat Elektronik (*e-mail*) yang ditujukan langsung kepada Dittahti Polda Jawa Timur.

Gambar 4.3
Proses Pelaporan Penyimpanan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor
Roda Dua



Sumber: Data Sekunder, diolah Tahun 2018

Laporan bulanan tentang penyimpanan benda sitaan yang disimpan Sattahti Polres Kabupaten Jombang, dikirimkan oleh Kasattahti Polres Kabupaten Jombang setiap bulan melalui fasilitas surat elektronik (e-mail) kepada Dittahti Polda Jawa Timur mencangkup tentang.²⁶

1. Laporan jumlah barang bukti yang di tangani oleh penyidik Polres Jombang dan jajarannya serta rekapitulasi Barang Bukti pada bulan tertentu. Dalam hal ini barang bukti secara umum, termasuk diantaranya jumlah kendaraan bermotor roda dua yang disita penyidik Polres Kabupaten jombang dan telah disimpan di Sattahti Polres Kabupaten Jombang
2. VCD yang berisi daftar Barang Bukti yang ditangani Polres Jombang dan jajarannya
3. Laporan jumlah barang bukti yang bernilai ekonomis yang ditangani oleh penyidik Pores Kabupaten Jombang dan jajarannya pada bulan

²⁶ Data Barang Bukti yang ditangani Polres Jombang dan jajarannya bulan September 2017, diolah

tertentu. Dalam hal ini lebih dikhususkan pada jumlah kendaraan bermotor roda dua yang disita oleh penyidik Polres Kabupaten Jombang, karena kendaraan bermotor roda dua termasuk ke dalam benda yang bersifat ekonomis.

4. Kemudian juga berisi *Print Out* Laporan Bulanan Pengelolaan Barang Bukti via E-mail

Laporan bulanan ini ditandatangani oleh Kasattahti Polres Kabupaten Jombang, dengan tembusannya kepada Kapolda Jatim, Irwasda Polda Jatim, Karo Ops Polda Jatim, Bidkeu Polda Jatim, dan Kabag ops Polres Kabupaten Jombang

Sama hal nya dengan laporan bulanan, laporan semester juga dikirimkan oleh Kasattahti Polres Kabupaten Jombang setiap semester melalui fasilitas surat elektronik (e-mail) kepada Dittahiti Polda Jawa Timur.²⁷ Namun bedanya laporan semester dikirimkan per 6 (enam) bulan sekali, yakni di bulan Juni dan Desember. Laporan semester ini mencakup laporan rincian barang bukti yang bersifat ekonomis saja, dimana salah satunya kendaraan bermotor roda dua.

Laporan Tahunan dibuat oleh Kasattahti Polres Kabupaten Jombang dengan jangka waktu satu tahun sekali berisikan akumulasi jumlah benda sitaan yang disimpan di Sattahti Polres Kabupaten Jombang. Sama halnya dengan laporan bulanan dan laporan semester, laporan tahunan ini juga dikirimkan Kasattahti Polres Kabupaten

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU H.A Darussalam, S.H (Kasat Tahti Kepolisian Resort Kabupaten Jombang) tanggal 25 April 2018

Jombang ke Dittahti Polda Jawa Timur dengan menggunakan fasilitas surat eletronik (*e-mail*).²⁸

Tabel 4.2
Laporan Tahunan Data Pengelolaan Barang Bukti Polres Kabupaten Jombang (Tahun 2017)

No	Bulan	Jumlah BB	Kondisi BB	Jumlah BB yang dititipkan	Jumlah Pengeluaran BB	Giat kontrol BB	Jumlah Supervisi
1	Januari	26	Sedang	-	26	4X	-
2	Februari	39	Sedang	-	39	4X	-
3	Maret	22	Sedang	-	22	4X	1X
4	April	22	Sedang	-	22	4X	-
5	Mei	28	Sedang	-	28	4X	-
6	Juni	18	Sedang	-	18	4X	-
7	Juli	22	Sedang	-	22	4X	-
8	Agustus	33	Sedang	-	33	4X	-
9	September	30	Sedang	-	30	4X	-
10	Oktober	54	Sedang	-	54	4X	-
11	November	121	Sedang	-	121	4X	1X
12	Desember	32	Sedang	-	32	4X	-
Jumlah		447		-	447	48X	2X

Sumber : Data Sekunder, diolah Tahun 2018

Jumlah supervisi yang terdapat dalam Laporan Tahunan Data Pengelolaan Barang Bukti Polres Kabupaten Jombang Tahun 2017 dilakukan 2x (dua kali) dalam satu tahun. Supervisi yang dimaksud disini adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur dengan cara memerintahkan anggota Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Timur untuk melakukan pengawasan terhadap

²⁸ Ibid.

jalannya Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Satthati) Polres Kabupaten Jombang. Pengawasan ini dilakukan melalui kegiatan:²⁹

- a. pemeriksaan catatan administrasi dan buku register daftar barang bukti;
- b. memeriksa kondisi tempat penyimpanan; dan
- c. memeriksa kondisi fisik barang bukti.

Maka terkait pelaporan secara periodik (bulanan, semester, dan tahunan) yang dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Timur dalam bentuk rekapitulasi, Dittahti Polda Jatim juga melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk supervisi ke Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres Kabupaten Jombang setiap 6 (enam bulan sekali).³⁰

C. Alasan Penyidik Polres Kabupaten Jombang Tidak Menyimpan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Rupbasan Kabupaten Jombang

Setelah penyidik Polres Kabupaten Jombang baik itu penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), maupun Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor roda dua untuk kepentingan penyidikan karena diduga terkait secara langsung ataupun tidak langsung suatu tindak pidana, penyidik tersebut menitipkannya di Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres Kabupaten Jombang untuk disimpan selama masa penyidikan berlangsung

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU H.A Darussalam, S.H (Kasat Tahti Kepolisian Resort Kabupaten Jombang) tanggal 25 April 2018

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Bambang Yulianto (Baur Barbuk Sattahti Kepolisian Resort Kabupaten Jombang) tanggal 27 April 2018

sampai dilimpahkannya ke Kejaksaan Kabupaten Jombang³¹. Mengingat terdapat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di wilayah Kabupaten Jombang, yang memang telah diberi wewenang oleh peraturan perundang – undangan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan, namun penyidik lebih memilih menitipkan dan menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor tersebut di Sattahti Polres Kabupaten Jombang. Berikut alasan penyidik Polres Jombang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan antara lain:

1. Penyimpanan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua bersifat sementara

Lamanya benda sitaan kendaraan bermotor roda dua berbanding lurus dengan lamanya masa penahanan tersangka. Artinya bila masa penahanan tersangka telah habis maka tersangka yang melakukan suatu tindak pidana beserta benda sitaan dalam hal ini kendaraan bermotor roda dua yang diduga terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap tindak pidana tersebut, harus segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang. maka dari itu dikatakan bahwa penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Polres Kabupaten Jombang bersifat sementara saja selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan berlangsung.³²

Lamanya waktu pemeriksaan dalam tingkat penyidikan memang tidak disebutkan dalam aturan KUHAP, namun melihat aturan masa

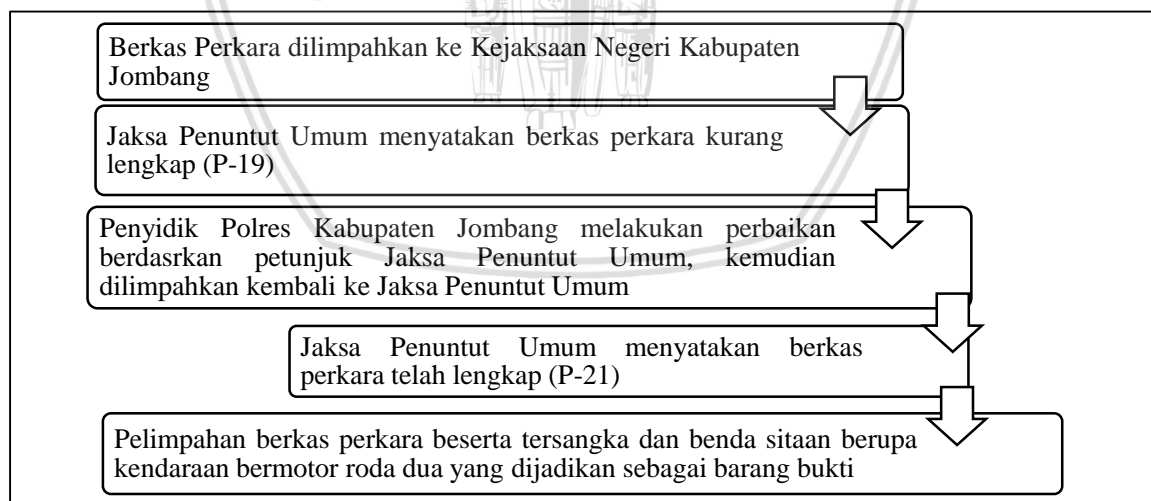
³¹ Hasil PraSurvey di Polres Kabupaten Jombang tanggal 26 Januari 2018

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Sahrul Arrifin (Anggota Satreskrim Polres Kabupaten Jombang) tanggal 3 Juni 2018

penahanan tersangka yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni 60 hari.³³ Maka waktu pemeriksaan di tingkat penyidikan pun mengikuti masa penahanan tersangka tersebut, yakni 60 hari, penyidik harus segera mengirim berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang, dan bila menurut Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara telah lengkap (P-21) maka penyidik mengirimkannya tersangka beserta benda sitaan kendaraan bermotor roda dua sebagai barang buktinya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang.

Maka dari itu dikatakan bahwa benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang berada di tangan penyidik hanya bersifat sementara.

Gambar 4.4
Alur Pelimpahan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua



Sumber: Data Sekunder, diolah Tahun 2018

³³ (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

2. Untuk mempertahankan status keaslian (*quo*) benda sitaan kendaraan bermotor roda dua untuk mempermudah proses penyidikan

Dalam hal ini status keaslian (*quo*) benda sitaan ini berarti kondisi barang bukti yang masih asli sebagaimana pada saat benda disita oleh penyidik. Status *quo* ini menjadi sangat penting bagi penyidik karena dapat menggambarkan bagaimana suatu tindak pidana terjadi dan bagaimana tersangka melakukan suatu tindak pidana. Status *Quo* ini juga juga mempengaruhi terang atau tidaknya suatu tindak pidana ataupun cukup atau tidaknya untuk dapat menemukan tersangkanya.

Dengan benda sitaan oleh disimpan penyidik di Sattahti Polres Kabupaten Jombang dan tidak disimpan di tempat lain, dalam hal ini Rupbasan Kabupaten Jombang, maka penyidik lebih bisa mempertahankan status *quo* dari benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut. Karena bila tidak terjaganya status *quo* ini maka penyidik sangat kesulitan untuk melakukan pemeriksaan suatu tindak pidana bahkan sulit untuk menemukan tersangkanya.³⁴

Status *quo* ini berkaitan dengan kualitas atau kondisi suatu benda sitaan kendaraan bermotor roda dua. Kualitas suatu benda sitaan sangatlah penting bagi penyidik mengingat benda sitaan yang dijadikan barang bukti suatu tindak pidana dapat dikembangkan dan dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai alat bukti dalam bentuk keterangan saksi. Di samping itu benda sitaan ini sebagai penentuan apakah suatu tindak pidana dapat dituntut oleh penuntut umum atau tidak. Dalam artian bila kualitas

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Sahrul Arrifin (Anggota Satreskrim Polres Kabupaten Jombang) tanggal 3 Juni 2018

suatu benda sitaan tidak terjaga selama proses penyidikan, maka tidak menutup kemungkinan penuntut tidak dapat melakukan penuntutan bahkan hakim menggugurkan perkara tersebut karena tidak didukung suatu barang bukti akibat rusaknya benda sitaan yang dijadikan barang bukti tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 140 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga penuntut membuat Surat Penghentian Penyidikan. Dan penyidik wajib membebaskan tersangka dari tahanan.

Alasan inilah yang membuat penyidik lebih memilih menyimpan barang bukti kendaraan bermotor roda dua di lingkungan Polres Kabupaten Jombang, bukan di Rupbasan Kabupaten Jombang. Penyidik lebih bisa mengawasi pengelolaan agar terjaganya kualitas benda sitaan kendaraan bermotor tersebut. Sehingga kualitas saat benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut sama dengan awal penyitaan dilakukan sampai dilimpahkan ke kejaksaan. Maka dari itu sepenting inilah, status keaslian (*quo*) dan kualitas benda sitaan yang dijadikan barang bukti suatu perkara pidana.

3. Penyidik menganggap proses penyidikan harus efisien baik dalam hal waktu, tenaga, dan biaya

Prinsip yang selalu dipegang penyidik Polres Kabupaten Jombang adalah waktu pemeriksaan yang cepat, mengingat Hukum Acara Pidana beasas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Cepat dalam hal ini salah satunya terkait dengan lamanya proses penyidikan, menurut penyidik Polres Kabupaten Jombang, bila suatu benda sitaan kendaraan bermotor roda dua

disimpan di Rupbasan Kabupaten Jombang, maka dapat mempengaruhi lamanya pemeriksaan suatu tindak pidana pada tingkat penyidikan. Lain halnya jika benda sitaan kendaraan bermotor roda dua berlokasi dekat dengan penyidik Polres Kabupaten Jombang, bila sewaktu – waktu penyidik Polres Kabupaten Jombang membutuhkan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut untuk kepentingan penyidikan maka dapat dengan mudah penyidik Polres Kabupaten Jombang menjangkau lokasi dimana benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut disimpan.³⁵

Semakin mudahnya penyidik menjangkau lokasi tempat penyimpanan benda sitaan tersebut, semakin cepat penyidik menyelesaikan pemeriksaannya dan dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang, hal ini adalah upaya penyidik agar suatu tindak pidana dapat segera cepat diselesaikan pemeriksaannya dan segera dapat diputus terkait status benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut oleh pengadilan. Apakah barang bukti tersebut dimusnahkan, disita oleh negara, ataukah dikembalikan ke pemilik barang bukti. Tentu hal demikian dapat menjamin kepastian hak pemilik atas kendaraan bermotor roda dua yang disita sebagai barang bukti tersebut. Sehingga dapat dipergunakan kembali oleh pemilik maupun yang menguasai benda sitaan kendaraan bermotor tersebut untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. karena jika semakin berlarut larut proses pemeriksaan di penyidikan akibat dari tidak terjangkaunya benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut, semakin

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Agus Setiyoutomo,SH (Anggota Satreskrim Polres Kabupaten Jombang) tanggal 6 Juni 2018

lama pula dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang, dan semakin lama dilakukan penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan, hal ini tentu tidak dapat memenuhi asas cepat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Selanjutnya terkait faktor tenaga dan biaya yang menjadi alasan penyidik Polres Kabupaten Jombang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kabupaten Jombang, karena benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang disita oleh Penyidik Polres Jombang berjumlah lebih dari 1 maka dari itu diperlukan transportasi yang dapat membantu membawa kendaraan-kendaraan bermotor roda dua tersebut dari Polres Kabupaten Jombang ke Rupbasan Kabupaten Jombang tentu hal ini menambah banyak biaya, mengingat posisi Rupbasan Kabupaten Jombang berada jauh dari lokasi Polres Kabupaten Jombang yakni sekitar 14,7 km.³⁶

Hal ini membuat penyidik Polres Jombang lebih memilih menyimpannya sendiri di Lingkungan Polres Kabupaten Jombang. Belum lagi ketika harus pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang, maka semua benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut harus diangkut kembali dari Rupbasan Kabupaten Jombang ke Kejaksaan Kabupaten Jombang. Faktor transportasi ini yang membutuhkan banyak biaya dan tenaga.

4. Tidak adanya aturan yang mewajibkan penyidik menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan

³⁶ Ibid

Menurut penyidik Polres Kabupaten Jombang, aturan Pasal 44 ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara” . Tidak bersifat wajib, karena tidak ada frasa wajib dalam ayat 1 pasal 44 tersebut, namun bila terdapat keharusan atau kewajiban menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua, maka tentu penyidik Polres Kabupaten Jombang menyimpan semua benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut di Rupbasan Jombang.³⁷

Disamping itu pula, penyidik berpendapat tidak adanya kejelasan terkait Pasal 44 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut, dalam artian tidak ada peraturan pelaksana terkait penyimpanan benda sitaan di Rupbasan. Dan tidak ada pula sanksi administrasi dan sanksi hukum terkait penyidik yang tidak menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kabupaten Jombang. maka dari itu pula, penyidik berfikir bahwa menyimpan benda sitaan tidak harus di Rupbasan.³⁸

Dan ada peraturan lain yang memperbolehkan penyidik menyimpan barang bukti di lingkungan kepolisian yakni Perkap No 8/2014 tentang Perubahan Perkap No 10/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri, karena sudah adanya dasar hukum ini inilah, penyidik lebih memilih menyimpan barang bukti kendaraan bermotor tersebut di lingkungan Polres Jombang. Namun memang sebelum dibentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

³⁷ Ibid

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Agus Setiyoutomo,SH (Anggota Satreskrim Polres Kabupaten Jombang) tanggal 6 Juni 2018

2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, penyidik Polres Kabupaten Jombang sudah menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kabupaten Jombang. tetapi dari berbagai pertimbangan dengan kondisi dihadapi Penyidik Polres Kabupaten Jombang, dan setelah dibentuknya dan diberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, penyidik Polres Kabupaten Jombang tidak ragu lagi memilih menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut di lingkungan Polres Kabupaten Jombang.

Perkap No 8/2014 tentang Perubahan Perkap No 10/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri merupakan peraturan pelaksana yang dibentuk Kepala Polisi Republik Indonesia, untuk melaksanakan aturan yang ada pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia terutama aturan pelaksanaan mengenai pengelolaan benda sitaan di tingkat penyidikan. Sedangkan tujuan dari dibentuknya Perkap No 8/2014 tentang Perubahan Perkap No 10/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polri dalam Pasal 2.

Terkait dengan alasan penyidik ini, sebenarnya ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyidik maupun penuntut umum menyimpan benda yang disita selama proses pemeriksaan untuk disimpan di Rupbasan, yakni PP No 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal

27.³⁹ Undang –undang lain yang membahas kewajiban penyidik mewajibkan penyimpanan benda sitaan di Rupbasan adalah Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴⁰

Selain dua peraturan perundang-undangan tersebut, di tahun 2011, telah ada Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Nomor KEP/259/A/JA/12/2011 Nomor KEPB-01/01-55/11/2011 Nomor M.HH-10 HM.03.02 Tahun 2011 Nomor 199/KMA/SKB/XII/2011 Nomor 219/PMK.04/2011 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.⁴¹ Peraturan bersama ini dibentuk karena masih munculnya perbedaan pemahaman antar penegak hukum dalam hal penyimpanan benda sitaan maupun benda rampasan. Maka dari itu, dengan adanya peraturan bersama ini lebih mengungatkan posisi Rupbasan sebagai

-
- ³⁹ (1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.
- (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.
- (3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.
- (4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

⁴⁰ Benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan

⁴¹ Hasil wawancara prasurvey dengan Bapak Suko Wadojo (Pengelola Basan dan Baran Rupbasan Kelas II Kabupaten Jombang), pada tanggal 23 Januari 2018, diolah.

tempat penyimpanan benda sitaan negara.⁴² Dan dengan adanya peraturan bersama ini, dapat mewujudkan sinkronisasi dalam ketatalaksanaan pengelolaan benda sitaan maupun benda rampasan negara dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.

Namun peraturan bersama ini hanya berlaku 1 (satu) tahun setelah ditandatangani,⁴³ itu artinya untuk tahun 2012 sampai 2018 peraturan bersama ini sudah tidak berlaku. Dan kondisinya sekarang, muncul ketidaksinkronisasi kembali dalam hal pengelolaan benda sitaan negara.

5. Telah dibentuk Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) di Kepolisian Resort Kabupaten Jombang

Terkait dasar hukum Perkap No 8/2014 tentang Perubahan Perkap No 10/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri, tahun 2010 telah dibentuk Sattahti Polres Kabupaten Jombang (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) yang berwenang mengelola barang bukti yang disita penyidik salah satunya kendaraan bermotor roda dua, dimana tugas dan wewenangnya pun telah jelas diatur dalam Perkap No 8/2014 tentang Perubahan Perkap No 10/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri., yakni melaksanakan penyimpanan benda sitaan

⁴² Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Basan dan Baran disimpan pada:

(a) Rupbasan

(b) Tempat penyimpanan barang bukti yang berada di Luar Rupbasan

⁴³ Pasal 9 ayat (4) kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

berserta pengelolaan administrasinya. Benda sitaan disini salah satunya kendaraan bermotor roda dua.⁴⁴

Pembentukan Sattahti ini di tahun 2010 tentu bertujuan untuk memudahkannya penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua, penyidik Polres Kabupaten Jombang juga lebih mudah menjangkau keberadaan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua ini bila sewaktu – waktu dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan. Keberadaan benda sitaan nya pun lebih mudah diawasi oleh penyidik Polres Kabupaten Jombang, mengingat lokasi Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres Kabupaten Jombang berada di lingkungan Polres Kabupaten Jombang. dan terkait administrasinya, lebih mudah dilakukan daripada administrasi saat melakukan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan Kabupaten Jombang.

Administrasi ini terkait dengan pengurusan surat ataupun berita acara mengenai penerimaan ataupun pengeluaran saat penyidik Polres Kabupaten Jombang menitipkan atau meminta ijin Sattahti Polres Kabupaten Jombang mengeluarkan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua untuk kepentingan penyidikan, karena masih dalam satu lokasi yang sama yakni di Lingkungan Polres Kabupaten Jombang, maka sistem administrasi dan birokrasi lebih mudah dilakukan saat penyidik Polres Kabupaten Jombang menyimpan benda sitaannya di Satuan Tahan dan

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Agus Setiyoutomo,SH (Anggota Satreskrim Polres Kabupaten Jombang) tanggal 3 Mei 2018

Barang Bukti Polres Kabupaten Jombang. dan hal yang berbeda bila penyimpanan dilakukan di Rupbasan Kabupaten Jombang.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Pasal 70 menerangkan tugas dan fungsi dari Sattahti. Selain ada pada Perkap No 8/2014 tentang Perubahan Perkap No 10/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri, tugas wewenang Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) juga terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort. Sehingga memang pembentukkan Satuan Tahanan dan Barang Bukti di lingkungan Polres, untuk memudahkan penyimpan benda sitaa salah satunya kendaraan bermotor untuk kepentingan proses penyidikan.

Menurut analisis, bila pembentukan Sattahti dilakukan tahun 2010, tentu pembentukkan ini tidak akan berfungsi, mengingat di Tahun 2011 telah adanya Peraturan Bersama Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. Dimana dalam peraturan bersama ini menjadi pedoman bahwa penyimpanan benda sitaan dalam proses pemeriksaan perkara tahap penyidikan ada pada Rupbasan. Dan bila penyidik masih menyimpan benda sitaan di Sattahti tahun 2011, tentu menyalahi aturan dalam peraturan bersama ini, meskipun kenyataannya sekarang peraturan bersama ini tidak berlaku.

6. Masih tersedia tempat untuk menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Sattahti

Penyidik berpendapat bahwa penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua masih bisa dilakukan di lingkungan Polres Kabupaten Jombang, dalam artian belum membutuhkan penyimpanan di tempat lain dalam hal ini yang dimaksud adalah Rupbasan Kabupaten Jombang, karena wujud benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tidak terlalu besar dan bersifat tidak berbahaya maka penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua ini masih bisa dilakukan di Polres Kabupaten Jombang, mengingat juga Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mewajibkan penyidik menyimpannya di Rupbasan. Kecuali memang gudang penyimpanan barang bukti di lingkungan Polres Kabupaten Jombang telah penuh dan tidak cukup untuk menampung kendaraan bermotor roda dua yang disita oleh penyidik Polres Kabupaten Jombang, pada saat inilah penyidik Polres Kabupaten Jombang kemudian berkoordinasi dengan petugas Rupbasan Kabupaten Jombang, untuk dilakukan penyimpanan di lingkungan Rupbasan Kabupaten Jombang.⁴⁵

Lain hal nya jika benda sitaan bukan merupakan kendaraan bermotor roda dua, melainkan berukuran lebih besar seperti kendaraan bermotor roda 4 ataupun lebih dari 4, untuk benda sitaan seperti ini memang membutuhkan tempat penyimpanan yang luas dan itu ada di Rupbasan Kabupaten Jombang. Menurut penyidik, benda sitaan yang memang membutuhkan penyimpanan di Rupbasan Kabupaten Jombang dalam bentuk misalnya

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Sahrul Arrifin (Anggota Satreskrim Polres Kabupaten Jombang) tanggal 8 Mei 2018

pupuk yang berjumlah lebih dari beberapa sak , limbah, ataupun balok kayu yang ukurannya memang relatif sangat besar, sedangkan benda sitaan dalam bentuk kendaraan bermotor roda dua belum membutuhkan penyimpanan di Rupbasan Kabupaten Jombang. Mengingat juga Polres Kabupaten Jombang telah memiliki Sattahti sebagai tempat penyimpanan barang bukti

Menurut penyidik Polres Kabupaten Jombang dalam hal penyimpanan benda sitaan ini memang ada dua lembaga yang berwenang, yakni: ⁴⁶

- a. Internal yaitu Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) Polres Kabupaten Jombang
- b. Eksetenal yaitu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) Kabupaten Jombang

Pemilihan penyidik Polres Kabupaten Jombang terhadap Sattahti Polres Kabupaten Jombang sebagai tempat penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua, memang dirasa masih memadai. Kecuali keadaan tempat penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki Sattahti Polres Kabupaten Jombang kurang memadai untuk dijadikan tempat penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua, maka penyidik Polres Kabupaten Jombang sudah tentu menyimpanannya di Rupbasan Kabupaten Jombang.

Namun bila kendaraan bermotor roda dua ini merupakan barang temuan dan masih belum diketahui pemiliknya, atau benda temuan ini masih

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Sahrul Arrifin (Anggota Satreskrim Polres Kabupaten Jombang) tanggal 8 Mei 2018

berhubungan dengan suatu tindak pidana tertentu namun tersangkanya masih belum ditangkap atau melarikan diri (status DPO). Maka kendaraan bermotor roda dua ini disimpan di Rupbasan Kabupaten Jombang, karena berdasarkan pertimbangan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam mencari pemilik atau yang berhak atas barang temuan kendaraan bermotor roda dua tersebut karena harus menunggu respon masyarakat setelah penyidik Polres Kabupaten Jombang mengumumkan benda temuan tersebut melalui media massa dalam bentuk cetak maupun elektronik. Dan perkiraan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam menangkap tersangka yang belum tertangkap atau melarikan diri yang terkait dengan suatu tindak pidana tertentu yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan benda temuan kendaraan bermotor roda dua tersebut.

Menurut analisis, ruang penyimpanan benda sitaan yang dimiliki Sattahti masih belum memadai untuk dijadikan tempat penyimpanan benda sitaan yang dijadikan barang bukti di tingkat penyidikan. Belum memadai yang dimaksud adalah tidak adanya perbedaan kategori-kategori bentuk dan sifat dari benda sitaan. Dan faktanya, tidak adanya pemisahan tempat antara benda sitaan yang berwujud padat, gas, maupun cairan, semua dijadikan satu dalam tempat penyimpanan benda sitaan. Misalnya saja benda sitaan tabung gas yang dijadikan satu tempat dengan benda sitaan kendaraan bermotor. Tentu hal ini membahayakan bila terjadi ledakan tabung gas yang akan merusak kondisi benda sitaan kendaraan bermotor tersebut. Berbeda dengan pedoman penyimpanan yang ada pada Rupbasan, karena jelas ada pemisahan tempat tergantung dari sifat dan wujud benda sitaan. Hal ini

terdapat dalam aturan petunjuk dan pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan.⁴⁷

Gambar 4.5
Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Sattahti Polres Kabupaten Jombang



Sumber: Data Sekunder, diolah tahun 2018

7. Penyidik merasa lebih bertanggungjawab secara yuridis terhadap penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua

Jika melihat Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka pertanggung jawaban secara yuridis suatu benda sitaan ada pada

⁴⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

penyidik saat di pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, benda sitaan tersebut salah satunya kendaraan bermotor roda dua, konsekuensinya jika terjadi apa apa pada benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut maka penyidik Polres Kabupaten Jombang harus bertanggung jawab secara yuridis, sedangkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kabupaten Jombang hanya bertanggung jawab secara fisik terhadap benda sitaan yang disimpan di lingkungan Rupbasan Kabupaten Jombang. Mengingat pertanggungjawaban secara yuridis ada pada penyidik bila terjadi kerusakan barang bukti, maka penyidik Polres Kabupaten Jombang lebih memilih menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut di lingkungan Polres Kabupaten Jombang.⁴⁸

Tanggung jawab yuridis yang ada di tangan penyidik Polres Kabupaten Jombang selama benda sitaan kendaraan bermotor roda dua tersebut berada dalam status penyidikan, maka penyidik Polres Kabupaten Jombang berwenang dan bertanggungjawab melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hal inilah, penyidik Polres Kabupaten Jombang dapat mengembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak atas kendaraan bermotor roda dua yang telah disita, bila sudah tidak diperlukan dalam proses penyidikan lagi atau ternyata kendaraan bermotor roda dua yang disita tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dimaksud. Atas dasar memudahkan pihak yang berhak atau yang menguasai dalam mengambil kendaraan

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Sujadi (KBO Satreskrim Polres Kabupaten Jombang) tanggal 10 Mei 2018

bermotor roda dua miliknya yang telah disita, maka penyimpanan kendaraan bermotor roda dua ini dilakukan di Polres Kabupaten Jombang. karena letak dari Polres Kabupaten Jombang yang lebih dijangkau oleh masyarakat daripada letak Rupbasan Kabupaten Jombang. Disamping itu juga masyarakat kurang mengetahui tentang keberadaan lokasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Kabupaten Jombang.

Dalam Pasal 30 PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP diatur bahwa pertanggungjawaban terdapat dua (2) macam yakni pertanggungjawaban secara fisik dan yuridis. Dalam Pasal 30 ayat (2) PP No 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa pertanggungjawaban yuridis berada di tangan pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan tersebut, dalam hal ini berada di tangan penyidik, sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bahwa tanggung jawab fisik berada di tangan Kepala Rupbasan. Ada dua (2) macam tanggung jawab ini tentu mempunyai maksud agar tanggung jawab penyimpanan benda sitaan tidak berpusat pada penyidik saja, dan terbagi pada Kepala Rupbasan, sehingga penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan secara maksimal, dan dilakukan dalam rangka memenuhi hak asasi manusia.

Karena penyidik Polres Kabupaten Jombang hanya mengenal tanggung jawab yuridis maka mereka tidak menyimpan benda yang telah disitanya di luar jangkauan pengawasannya dalam hal ini tidak disimpan di Rupbasan Kabupaten Jombang. ini diakibatkan karena penyidik Polres Kabupaten Jombang tidak mengetahui aturan mengenai penyimpanan benda sitaan dalam PP No 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagai

aturan pelaksana dari Pasal 44 KUHAP. Dimana artinya adalah apa yang dilakukan penyidik yakni menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Sattahti Polres Kabupaten Jombang bertentangan dengan Pasal 44 KUHAP.

Bila dilihat dari berlakunya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengeloan Benda Sitaan di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia tentu bertentangan dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada dasarnya Peraturan Kapolri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Meskipun tidak secara tegas menyebut jenis peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Kapolri, namun frasa “Peraturan yang

ditetapkan..lembaga..” di atas dalam hal ini yang dimaksud adalah lembaga kepolisian, mencerminkan keberadaan Peraturan Kapolri diakui keberadaannya. Namun bila terjadi konflik antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengeloan Benda Sitaan di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, bila dianalisis melalui asas *lex superior derogate lex inferiori*, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengeloan Benda Sitaan di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia), apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan, dalam hal ini terkait tentang tempat penyimpanan benda sitaan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyimpanan benda sitaan tetap dilakukan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kabupaten Jombang bukan di Satuan Tahanan Barang Bukti Polres Kabupaten Jombang. dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengeloan Benda Sitaan di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia harulah dinyatakan

tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Polres Kabupaten Jombang

Pelaksanaan penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor di Polres Kabupaten Jombang tidak berpedoman pada Pasal 44 KUHAP melainkan pada Perkap No 8/2014 tentang Perubahan Perkap No 10/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri, dimana penyimpanannya dilakukan di Sattahti Polres Kabupaten Jombang, dengan pengelolaannya dimulai dari:

- 1) Penerimaan benda sitaan oleh Sattahti
 - 2) Pengamanan terhadap benda sitaan
 - 3) Pengeluaran benda sitaan
 - 4) Pelaporan penyimpanan benda sitaan kepada Direktorat Perawatan Tahanan (Dittahti) Polda Jawa Timur
2. Alasan Penyidik Polres Kabupaten Jombang Tidak Menyimpan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Rupbasan Kabupaten Jombang
 - 1) Penyimpanan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua bersifat sementara
 - 2) Untuk mempertahankan status keaslian (*quo*) benda sitaan kendaraan bermotor roda dua untuk mempermudah proses penyidikan.

- 3) Penyidik menganggap proses penyidikan harus efisien baik dalam hal waktu, tenaga, dan biaya
- 4) Tidak adanya aturan yang mewajibkan penyidik menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Rupbasan.
- 5) Telah dibentuk Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) di Kepolisian Resort Kabupaten Jombang
- 6) Masih tersedia tempat untuk menyimpan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua di Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Sattahti
- 7) Penyidik merasa lebih bertanggungjawab secara yuridis terhadap penyimpanan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua

B. Saran

- a) Mencabut Peraturan Kapolri Nomor Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia karena bertentangan dengan Pasal 44 KUHAP.
- b) Terkait posisi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) Kabupaten Jombang yang terlalu jauh dari Polres Kabupaten agar dipindahkan dekat dengan posisi Polres Kabupaten Jombang
- c) Untuk tetap menjalin sinkronisasi terutama antara penyidik dan pihak Rupbasan, agar bisa saling mengawasi soal pengelolaan benda sitaan kendaraan bermotor roda dua

- d) Membuat Peraturan bersama antara pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia terkait dengan aturan pelaksana tentang penyimpanan benda sitaan di Rupbasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, **Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana**, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
- Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya**, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ediwarman, **Monograf: Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Tolib Effendi, **Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana**, Setara Press, Malang, 2014.
- .Jur Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marzuki, **Metodologi Riset**, BPFE, Jogjakarta, 2002.
- Mohammad Bakrie, **Pengantar Hukum Indonesia (sistem hukum indonesia pada era reformasi)**, UB Press, Jilid 1, 2010.
- Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- H.M.A Kuffa, **Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan**, UMM Press, Malang, 2007.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

JURNAL

Fachurizka Maulidatul Chasanah, Penarapan Pasal 44 KUHP oleh Kejaksaan Melalui Penyimpanan Barang Bukti Berbasis Sistem Teknologi dan Informasi (Studi di Kejaksaan Negeri Surabaya), Jurnal Hukum, , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

INTERNET :

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Statistik Kriminal 2016 (online), <https://id.scribd.com/document/339973271/Statistik-Kriminal-2016-pdf> , (25 Maret 2018), 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 204

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478

Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemerntrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

